

Konsep Dasar Kehidupan Sosial Masyarakat Perikanan

Tjahjo Tri Hartono
Agus Heri Purnomo



PENDAHULUAN

Modul Konsep Dasar Kehidupan Sosial Masyarakat Perikanan ini secara sistematis terbagi atas 4 (empat) kegiatan belajar. Untuk dapat menguasai modul ini maka keempat kegiatan belajar tersebut harus dipelajari secara runut, mulai dari kegiatan belajar pertama hingga kegiatan belajar terakhir atau keempat yang secara berurutan adalah: 1) Beberapa Wawasan Kehidupan Sosial Masyarakat Perikanan; 2) Keteraturan Moral dalam Kehidupan Sosial; 3) Definisi Sosial, Perspektif dan Peranan; dan 4) Keterangan: Peranan-peranan Sosial dan Ketimpangan Sosial.

Kegiatan Belajar Pertama berisikan materi tentang empat wawasan atau cara pandang dalam memahami kehidupan sosial masyarakat perikanan, yaitu Wawasan Masyarakat, Wawasan Sistem Sosial, Wawasan Kekuasaan dan Wewenang serta Wawasan Individualistik. Keempat wawasan tersebut tidaklah bersifat parsial namun bersifat saling melengkapi. Sifat penggunaan keempat wawasan ini mencerminkan pula kompleksitas kehidupan sosial masyarakat perikanan di Indonesia.

Kegiatan Belajar Kedua berisikan materi yang dapat mengasah keterampilan terkait dengan penggunaan wawasan-wawasan kehidupan sosial yang diuraikan pada kegiatan belajar yang pertama. Kegiatan belajar ini diawali dari kesadaran kita bahwa cara berpikir dalam kehidupan sehari-harinya termasuk dalam hal ini adalah individu-individu di dalam masyarakat perikanan. Mereka menafsirkan dan memahami keteraturan kehidupan sosialnya dilandasi oleh peraturan-peraturan moral. Artinya, keteraturan faktual di dalam kehidupan sehari-hari selalu mengandung nilai moral dan karenanya setiap individu di suatu masyarakat wajib menerima sebagai fakta apa yang bagi orang lain telah diterima sebagai fakta. Untuk memahami hal

tersebut, kegiatan belajar ini secara berturut-turut membahas konsep-konsep dasar suatu keteraturan sosial, yaitu moral, norma, nilai, dan peraturan (*rules*). Pembahasan dimulai dengan uraian tentang batasan norma yang muncul dari sudut pandang masyarakat dan sudut pandang individualistik, yang melihat norma sebagai proses terbentuknya suatu "harapan" dari suatu anggota masyarakat. Pada bagian berikutnya, dikupas perihal bagaimana "harapan" tersebut pada kondisi tertentu berkembang, sebagai akibat berkembangnya pengetahuan yang dikuasai oleh individu-individu anggota masyarakat. Kegiatan Belajar Kedua ini juga membahas perubahan yang terjadi pada "harapan" tersebut serta sumber penyebabnya. Dalam hal ini diuraikan penggunaan wawasan kekuasaan dan wewenang.

Kegiatan Belajar Ketiga membahas lebih dalam tentang proses terbentuknya interpretasi individu terhadap kenyataan sosial. Materi kegiatan belajar ini menunjukkan bagaimana proses dalam memberikan definisi dan situasi yang dihadapi oleh anggota masyarakat perikanan. Dengan kata lain, materi ini menggambarkan tingkah laku sehari-hari seseorang di masyarakat perikanan sesungguhnya merupakan hasil dari pendefinisian individu yang bersangkutan pada situasi yang ada di sekitarnya atau lingkungan yang melingkupinya. Tampak pula bahwa pemahaman terhadap definisi situasi individu di dalam masyarakat perikanan berguna dalam melihat bagaimana individu menginterpretasikan norma yang ada dan melalui cara apa norma serta keteraturan sosial dalam masyarakat perikanan dipertahankan atau diubah.

Kegiatan belajar keempat terkait erat dengan proses dan interaksi yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya masyarakat perikanan. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Dengan kata lain, proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama, misalnya: pengaruh-mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dan hukum, dan seterusnya. Dalam materi kegiatan belajar ini, proses sosial lebih banyak disinggung dari sisi bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu bentuk-bentuk yang tampak apabila orang-orang perorangan ataupun kelompok-kelompok manusia mengadakan hubungan satu sama lain, terutama dengan menyetengahkan kelompok serta lapisan

sosial sebagai unsur pokok struktur sosial. Pemahaman tentang interaksi sosial sangat berguna di dalam memperhatikan dan mempelajari berbagai masalah masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman perihal kondisi-kondisi apa yang dapat menimbulkan serta mempengaruhi bentuk-bentuk interaksi sosial tertentu dapat disumbangkan pada usaha bersama yang dinamakan pembinaan atau lebih dikenal sebagai pembangunan masyarakat (*community development*). Adapun terwujudnya suatu interaksi sosial dapat diuji melalui konsep "Keterasingan". Konsep ini memberikan suatu kerangka analisis suatu keadaan di mana orang yang tidak dapat mematuhi norma-norma sosial mengindikasikan ketidak-mampuannya untuk mendukung peranan-peranan yang dimainkannya, dan selanjutnya berakibat pada terasingnya individu yang bersangkutan dari peranan-peranan tersebut. Dalam hal ini, pembahasan secara implisit banyak bersinggungan dengan aspek kontak dan komunikasi (proses penafsiran seseorang terhadap perilaku orang lain dalam wujud percakapan, gerak-gerik tubuh atau sikap) antarpelakunya di dalam pembentukan proses sosial itu sendiri.

Setelah mempelajari Modul 1 ini Anda diharapkan secara umum mampu memahami beberapa konsep dasar Sosiologi sebagai landasan dalam menyimak kehidupan sosial masyarakat perikanan. Secara khusus, Anda diharapkan dapat:

1. mendefinisikan masyarakat perikanan dan wawasan kehidupannya
2. menjelaskan konsep wawasan masyarakat;
3. menjelaskan konsep wawasan sistem sosial;
4. menjelaskan konsep wawasan kekuasaan dan konflik;
5. menjelaskan konsep wawasan individualistik;
6. menjelaskan norma dan sanksi dalam masyarakat;
7. menjelaskan proses pelebagaan norma dalam masyarakat;
8. menjelaskan konsep definisi situasi dan kelompok referensi;
9. menjelaskan konsep peranan;
10. menjelaskan konsep konflik peranan;
11. menjelaskan konsep keterasingan peranan sosial, dan penyimpangan;
12. menjelaskan konsep kekuasaan, kelas sosial, persamaan dan demokrasi.

Kegiatan Belajar 1

Wawasan Kehidupan Sosial Masyarakat

A. TERMINOLOGI MASYARAKAT PERIKANAN

Indonesia memiliki wilayah dengan karakteristik alam yang sangat mendukung kegiatan ekonomi berbasis pada pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan. Karakteristik tersebut terkait dengan panjang garis pantai yang mencapai 81.000 km dan luasan wilayah laut yang mencakup areal sebesar 5,8 juta km² atau 70% dari total cakupan wilayah negara. Karakteristik tersebut juga berhubungan dengan keberadaan sungai-sungai besar dan panjang yang dapat dijumpai di daratan pulau-pulau utama seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Danau-danau alam yang subur, bahkan Danau Toba di Sumatera Utara termasuk sebagai salah satu danau terluas di dunia, turut pula membentuk karakteristik daratan dari wilayah-wilayah sebagaimana yang dimaksud. Karakteristik wilayah tersebut sekaligus menjadikan sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal dekat, hidup bersama dan menggantungkan kehidupan pada sumber daya perikanan, baik yang terkandung di dalam laut, sungai ataupun danau-danau tersebut. Bagi masyarakat tersebut kegiatan di sektor perikanan menjadi sumber penghidupan utama mereka. Batasan inilah yang di dalam mata kuliah ini merupakan pegangan bagi kita untuk menjelaskan siapa yang dimaksud dengan masyarakat perikanan.

Berdasarkan pada jenis teknologi yang digunakan oleh mereka dalam memanfaatkan sumber daya perikanan, masyarakat perikanan terbagi menjadi dua tipe masyarakat. Tipe pertama adalah masyarakat perikanan tangkap (*capture fishery communities*), yaitu masyarakat yang memanfaatkan hasil sumber daya perikanan dari kegiatan penangkapan ikan. Oleh karena itu, masyarakat perikanan ini hampir sepenuhnya mengandalkan kemampuan regenerasi alamiah sumber daya perikanan beserta daya dukung alam di sekitarnya untuk mendukung keberlanjutan kegiatan perikanan tersebut. Sementara itu, tipe masyarakat perikanan yang kedua adalah masyarakat perikanan budidaya (*aquaculture fishery communities*). Berbeda dengan tipe masyarakat perikanan sebelumnya, masyarakat perikanan ini tidak sepenuhnya tergantung pada alam, mereka telah menggunakan teknologi yang di dalamnya tergolong pada rekayasa terhadap alam dan lingkungan di

sekitar mereka agar dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk-produk yang berasal dari sumber daya perikanan.

Masyarakat perikanan juga dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok masyarakat. Berdasarkan keterkaitan mata pencaharian secara langsung dengan sektor perikanan, masyarakat perikanan tangkap terdiri atas masyarakat nelayan, masyarakat pengumpul dan pengolah hasil tangkapan. Kondisi ini juga dijumpai pada masyarakat perikanan budidaya. Kelompok-kelompok inilah yang mendominasi kehidupan masyarakat perikanan. Di luar kelompok masyarakat tersebut, ada juga sebagian kecil warga yang menjadi kelompok masyarakat yang tidak terkait langsung dengan mata pencaharian di sektor perikanan, seperti pegawai, tukang, dan lain sebagainya. Mereka termasuk ke dalam suatu masyarakat perikanan oleh adanya faktor keterkaitan hubungan sosial dengan kelompok-kelompok yang disebut pertama karena tinggal bersama di dalam suatu wilayah.

B. PENTINGNYA WAWASAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT PERIKANAN

Cara kita melihat suatu masyarakat perikanan tidaklah cukup sebagaimana kita membagi masyarakat berdasarkan mata pencahariannya begitu saja seperti yang diuraikan sebelumnya. Kita harus mampu mengenal dan memahami bagaimana kehidupan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat perikanan secara lebih mendalam dan dalam satu kesatuan yang utuh. Kebutuhan akan hal ini muncul, terutama oleh karena diterapkannya berbagai kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat perikanan (Dahuri, 2000 *dalam* Satria, 2001).

Tanpa disadari, terutama oleh para pengambil keputusan tentang kebijakan pembangunan, pembangunan sesungguhnya telah mengakibatkan perubahan struktur dan tata nilai masyarakat yang bersangkutan. Perubahan itu ditunjukkan oleh adanya keragaman *reaksi* masyarakat yang sesungguhnya menginginkan suatu *adaptasi* terhadap keadaan baru yang diakibatkan oleh pembangunan. Pemahaman terhadap keragaman reaksi dan perubahan struktur tersebut penting dan menentukan keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan pembangunan.

Di negara-negara maju, misalnya Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, perbedaan *reaksi* dimaksud telah menjadi perhatian besar para ahli

ilmu sosial. Kesadaran mereka akan adanya kecenderungan itu mulai muncul sejak mereka sadar bahwa berbagai program pembangunan yang bersifat *top-down*, yaitu program pembangunan yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan oleh pemerintah dan umumnya berlaku sama untuk seluruh daerah yang mendapatkannya, ternyata tidak mendapatkan hasil yang sama antara satu daerah dengan daerah lain dan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Di beberapa daerah, berdasarkan indikator keberhasilannya, program-program pembangunan tersebut dapat dinilai berhasil, namun sebaliknya di daerah-daerah lain dinilai kurang atau bahkan tidak berhasil.

Lebih lanjut, perbedaan *reaksi* masyarakat yang berakibat pada perbedaan hasil pembangunan tersebut oleh banyak ahli ilmu sosial disepakati sebagai akibat dari kemajemukan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Para ahli tersebut juga berpendapat bahwa tidak ada dua negara yang mengalami proses pembangunan dalam bentuk yang sama. Pendapat tersebut dilandasi oleh kenyataan bahwa semakin meningkat dan meluasnya pembangunan maka masalah yang dihadapi semakin kompleks dan berbeda. Mereka menyimpulkan bahwa pembangunan haruslah dilakukan berdasarkan kondisi spesifik masyarakat. Dilandasi oleh keyakinan tersebut maka saat ini negara-negara maju telah melakukan berbagai upaya untuk mengoleksi data atau informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Kemudian, hasil analisis dari kumpulan data tersebut sudah banyak diaplikasikan, baik untuk tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi suatu program pembangunan (Cernea, 1988; Masinambow, 1994). Contoh penggunaan dan informasi data dan kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat perikanan terkait dengan program pembangunan sektor perikanan akan diberikan pada bagian akhir modul mata kuliah ini (Modul VI, Identifikasi dan Analisis Peran dan Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Perikanan dalam Pembangunan Perikanan Berkelanjutan).

Di Indonesia sendiri, informasi tentang aspek-aspek sosial ekonomi masyarakat perikanan, yang di dalamnya mencakup gambaran tentang struktur dan dinamika reaksi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan, sepertinya hingga kini belum merupakan suatu prioritas yang perlu dilakukan. Banyak di antara kita belum menyadari pentingnya pemahaman tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat perikanan, terutama dalam kaitannya dengan proses pembangunan yang sedang kita laksanakan. Selain itu, terbatasnya informasi seperti itu juga dikarenakan

kehidupan sosial ekonomi masyarakat perikanan di negara kita sangatlah beragam dan juga merupakan bidang kajian yang relatif baru berkembang di negara kita.

Dengan uraian tersebut di atas, mungkin saat ini telah muncul pertanyaan pada diri kita: "Bagaimana cara memahami kehidupan sosial ekonomi masyarakat perikanan di negara kita?". Pertanyaan ini akan dapat terjawab jika kita menguasai dan mendalami berbagai wawasan yang terkait dengan pemahaman tentang kenyataan sosial ekonomi masyarakat perikanan dikarenakan pemahaman kita terhadap *bangunan* dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat akan sangat tergantung pada wawasan kita sendiri. Cara ini lebih baik daripada kita berusaha mengambil suatu bagian dari kenyataan atau fenomena sosial ekonomi untuk dijadikan masalah utamanya.

Wawasan dapat diartikan sebagai sudut pandang, yaitu suatu cara tersendiri untuk mengamati sesuatu, dengan menatanya sedemikian rupa sehingga bermakna dan dapat dipahami oleh kita (Berry, 2003). Perlu diperhatikan bahwa setiap wawasan selalu bersifat parsial dan merupakan suatu hasil pengamatan yang sifatnya tidak lengkap. Dengan demikian, kita perlu pula memahami bahwa suatu gambaran menyeluruh tentang suatu situasi, yang mempertimbangkan segala sudut pandang dan segala aspek dari kenyataan sosial ekonomi, yang dalam hal ini terkait dengan masyarakat perikanan. Di samping itu, wawasan kita harus dapat dipandang sebagai suatu wawasan yang mencakup dan dibangun atas dasar wawasan orang-orang awam dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan anggota masyarakat perikanan tertentu. Bagian selanjutnya dalam kegiatan belajar ini menguraikan tentang empat wawasan yang dapat kita gunakan secara saling melengkapi, dan bukan sebagai suatu perangkat pandangan alternatif, untuk memahami kehidupan sosial suatu masyarakat perikanan. Sementara wawasan yang dapat digunakan oleh kita untuk memahami kegiatan ekonomi suatu masyarakat perikanan diuraikan pada modul selanjutnya.

C. WAWASAN MASYARAKAT

Judul mata kuliah ini, yaitu Sosial Ekonomi Masyarakat Perikanan, memberi isyarat pada kita pentingnya pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat. Di samping batasan khusus masyarakat perikanan yang telah diberikan di atas, secara umum masyarakat dipandang sebagai sesuatu kekuatan impersonal, yang mempengaruhi, mengekang dan

menentukan tingkah laku anggota-anggotanya. Durkheim, seorang sosiolog berkebangsaan Perancis, menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Dari kedua batasan masyarakat tersebut muncul kesimpulan yaitu keseragaman tingkah laku dalam suatu masyarakat haruslah dipandang sebagai produk masyarakat, dan bukannya merupakan sifat asli dari setiap anggota masyarakat tersebut.

Terkait dengan wawasan sebagai cara pandang, maka Wawasan Masyarakat adalah suatu cara pandang di mana masyarakat diposisikan sebagai institusi pemberi dan penentu semua peranan pada masing-masing anggotanya. Bagi anggota masyarakat, kondisi ini menyebabkan mereka hanya memiliki dua alternatif, yaitu menerima peranan yang ditentukan bagi seorang anggota masyarakat atau melepaskan keanggotaannya dalam masyarakat. Dua alternatif yang disediakan oleh suatu masyarakat pada anggota-anggotanya tersebut pada intinya mengandung pengertian *konformitas* (kepatuhan) sebagai kata kunci yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan apa yang harus dilakukan oleh seorang anggota masyarakat. Kepatuhan yang harus dilakukan oleh anggota masyarakat menyebabkan wawasan masyarakat bersifat deterministik. Artinya, wawasan ini merupakan suatu pandangan yang memiliki anggapan bahwa masyarakat merupakan suatu kekuatan supra natural, yang mampu mengontrol individu atau anggotanya. Kekuatan tersebut menyebabkan seseorang anggota tidak berdaya atas apa yang telah menjadi keinginan masyarakat.

Sebagai contoh penggunaan wawasan ini di masyarakat perikanan tangkap dapat dipahami melalui kasus nelayan andon. Nelayan andon, yaitu nelayan yang menetap sementara di daerah atau wilayah lain, diharuskan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat nelayan di daerah atau wilayah yang mereka singgahi. Jika aturan-aturan yang ditetapkan dan dibebankan kepada mereka tersebut tidak mau mereka laksanakan, maka tidak ada pilihan lain bagi mereka selain meninggalkan daerah atau wilayah yang mereka tinggali sementara tersebut. Walaupun begitu, manakala mereka telah memutuskan untuk berpindah dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya sebagai keputusan untuk tidak mematuhi aturan yang diberikan kepada mereka, mereka tanpa disadari akan kembali menghadapi berbagai peraturan yang diterapkan dan dibebankan oleh masyarakat di daerah baru tersebut akibat peran yang dimilikinya sebagai nelayan andon. Oleh karena itu, sesungguhnya nelayan andon tersebut tetap masih tidak terlepas dari

pengaruh masyarakat setempat. Mereka hanya dapat menentukan apakah mereka mau menerima atau tidak peran yang ditentukan oleh masyarakat di daerah yang mereka singgahi kepada mereka. Setiap keputusan yang dihasilkan tersebut hanya merupakan hasil dari kondisi sosial tertentu yang melingkupi si nelayan andon dan merupakan tindakan mengubah suatu perangkat pembatas sosial tertentu dengan pembatas yang lain.

Di masyarakat perikanan budidaya, contoh penggunaan wawasan masyarakat dengan hasil analisis yang berbeda dapat kita lihat pada kasus masyarakat pembudidaya ikan dengan keramba jaring apung di Waduk Jatiluhur. Sebagai anggota masyarakat, pembudidaya ikan terikat dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah setempat dengan Otorita Jatiluhur. Namun demikian, tidak dilaksanakannya berbagai peraturan yang ditetapkan dan seharusnya dipatuhi tersebut tidak membuat mereka harus keluar dari komunitas tersebut. Artinya, dalam kasus ini kita mendapat petunjuk bahwa si pemberi aturan sesungguhnya bukan atau belum menjadi bagian dari masyarakat pembudidaya ikan yang dimaksud. Pertanyaan lain yang muncul sekarang adalah: "Adakah hal lainnya yang belum tercakup dalam hasil analisis berdasarkan wawasan ini?" Sementara dari sisi aplikasinya muncul pertanyaan: "Bagaimanakah pemerintah menyikapi kenyataan sosial ini?"

D. WAWASAN SISTEM SOSIAL

Wawasan ini merupakan pengembangan dari Wawasan Masyarakat dan karenanya wawasan ini juga mencerminkan sikap fatalisme dan ketidakberdayaan. Perbedaan mendasar dengan wawasan masyarakat adalah di dalam wawasan ini terkandung gagasan bahwa sistem memiliki kekuasaan dan kekuatan yang mengatur individu dan kedua hal tersebut tidak dapat dijangkau atau digugat oleh individu-individu yang bersangkutan. Sistem memiliki kendali dalam hal bagaimana caranya suatu kehidupan sosial diatur dan diorganisasi. Oleh karena itu, wawasan sistem sosial dapat digunakan untuk skala unit sosial yang lebih beragam dibandingkan dengan Wawasan Masyarakat. Wawasan tersebut tidak hanya dapat digunakan dalam skala masyarakat namun juga untuk skala unit sosial yang kecil misalnya keluarga.

Wawasan Sistem Sosial bersifat deterministik, yaitu bahwa perubahan pada unsur sosial apapun dalam suatu sistem ditentukan oleh unsur-unsur lainnya; demikian pula setiap unsur merupakan determinan bagi unsur lainnya. Sifat ini juga mengandung pengertian adanya dua jenis interaksi di antara unsur-unsur yang beraneka ragam dalam sistem sosial. *Interaksi pertama* adalah interaksi yang diawali dengan perubahan yang disengaja terhadap suatu aspek kehidupan tertentu untuk menghasilkan reaksi-reaksi pada aspek-aspek lain sedemikian rupa sehingga sistem tersebut kembali kepada keadaan semula. *Interaksi kedua* adalah di mana suatu perubahan tertentu di dalam suatu aspek kehidupan tertentu menghasilkan akibat pada aspek-aspek yang lain sedemikian rupa sehingga memperbesar perubahan yang terjadi dalam sistem. Melihat bentuk interaksi yang terjadi, maka kita tidak atau sangat sedikit bersinggungan dengan individu-individu sebagai anggota masyarakat, melainkan lebih mengkaji aspek-aspek yang menjadi sub-subsistem kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Sebagai contoh bentuk interaksi pertama adalah bagaimana reaksi dari masyarakat nelayan suatu daerah dalam aspek ekonomi berupa adanya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dari daerah lain yang dapat menimbulkan keresahan. Mengacu pada Wawasan Sistem Sosial, keresahan tersebut sesungguhnya merupakan suatu bentuk dari terganggunya keseimbangan sistem sosial. Reaksi tersebut ditanggapi oleh pemerintah setempat dengan penerapan aturan-aturan yang melarang penggunaan alat-alat tangkap yang dimaksud sebagai upaya memulihkan keseimbangan sistem sosial dengan mengelola atau merubah aspek lain (aspek politik). Harapan pemerintah tidak lain adalah bahwa penerapan aturan-aturan tersebut akan membuat penggunaan alat tangkap ilegal dapat dikurangi atau dihilangkan. Seiring dengan itu akan menurun dan hilang pula reaksi yang timbul di kalangan masyarakat nelayan.

Sebaliknya, jika pemerintah setempat membiarkan penggunaan alat-alat tangkap tersebut dan bahkan mendukungnya, biasa terjadi adalah dengan alasan pertimbangan ekonomi (peningkatan retribusi hasil tangkapan) atau politik (kurangnya sarana dan prasarana pengawasan) maka terjadi bentuk interaksi kedua. Bentuk interaksi ini sering kali disebut pula sebagai suatu penyimpangan sosial. Fenomena penyimpangan sosial yang berlarut menyebabkan pemulihan keseimbangan sistem tidak akan terjadi, dan pada akhirnya dapat berakibat fatal terhadap sistem sosial yang ada. Sebagai contoh, struktur masyarakat yang tadinya merupakan masyarakat nelayan

akan berubah. Sebagai kelanjutan akibat dari penggunaan alat tangkap yang destruktif adalah rusaknya lingkungan yang berimplikasi pada berkurangnya hasil tangkapan nelayan. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh nelayan karenanya semakin tidak menguntungkan dan untuk itu nelayan beralih profesi ke mata pencaharian lain di luar sektor perikanan.

Pendekatan wawasan sistem sosial sebagaimana ditunjukkan oleh contoh kasus di atas juga menunjukkan bahwa kajian individu nelayan tidak atau sedikit sekali disinggung. Hal inilah yang dianggap sebagai kekurangan dari wawasan ini. Banyak pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan hanya menggunakan wawasan sistem sosial, seperti bagaimana respons individu, baik bagi si nelayan yang merasa dirugikan ataupun nelayan yang menjadi pelaku kegiatan penangkapan ilegal dalam contoh kasus kita, terhadap peraturan yang telah ditetapkan, tidak ditetapkan ataupun ada peraturan tetapi tidak diterapkan oleh pemerintah.

E. WAWASAN KEKUASAAN DAN KONFLIK

Dari uraian di bagian-bagian sebelumnya, Wawasan Masyarakat menuntut adanya kepatuhan dan Wawasan Sistem Sosial menekankan pada adanya suatu aspek yang harus dipenuhi. Adapun Wawasan Kekuasaan dan Konflik terfokus pada pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: siapa yang menuntut kepatuhan dari siapa, siapa yang menentukan yang harus kita mainkan, dan kebutuhan-kebutuhan siapakah sebenarnya yang dikatakan sebagai kebutuhan sistem atau masyarakat. Dari berbagai pertanyaan tersebut tampak bahwa kekuatan impersonal dari "masyarakat" kini muncul dalam konteks ketergantungan pada suatu kekuatan dari kelompok-kelompok sosial yang bermacam-macam di dalam masyarakat. Oleh karenanya, Wawasan kekuasaan dan konflik memfokuskan pada pembagian kekuasaan di dalam masyarakat. Alasannya adalah bahwa di dalam wawasan ini, pembagian kekuasaan merupakan hal yang menentukan keteraturan sosial. Peraturan-peraturan yang menentukan posisi dan mengatur perilaku anggota dalam kehidupan sosial dianggap mencerminkan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang kuat dalam masyarakat.

Pada dasarnya, keteraturan sosial bukan merupakan sesuatu yang secara sengaja dirancang dan dibentuk oleh sebuah persekutuan orang-orang yang berkuasa. Namun demikian, kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh

sekelompok orang memungkinkan kelompok tersebut *memaksakan* sebetuk *keteraturan* menurut versi mereka. Karena berada dalam kedudukan yang menguntungkan, kelompok kuat dan berkuasa dapat dengan mudah mengusahakan diterimanya peraturan yang menunjang kepentingan, atau mengubah peraturan-peraturan yang tidak menguntungkan mereka. Betapa kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai bakul ikan atau juragan darat memiliki kekuatan dan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai pembudidaya ikan atau nelayan, sangat terbuka untuk menentukan terbentuknya pola *patron-klien*, sesuatu ikatan perdagangan yang sangat menguntungkan mereka.

Berdasarkan besarnya kekuasaan yang dimiliki, tampak bahwa di masyarakat terbentuk kelas-kelas sosial. Kadang-kadang pembagian kekuasaan dalam masyarakat sangat jelas sehingga dapat dibedakan kelompok-kelompok mana yang dominan serta berkuasa dan kelompok mana yang termasuk kelas-kelas bawah. Wawasan "kekuasaan" berpegang teguh pada pandangan bahwa masyarakat terbentuk dari kelas-kelas sosial yang dibedakan berdasarkan kekuasaan. Kelas-kelas tersebut secara nyata atau secara potensial berada dalam konflik satu sama lain. Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan penggunaan kekuasaan oleh kelompok-kelompok yang lebih berkuasa sedikit banyak akan merugikan kelompok yang tidak berkuasa. Artinya, kelompok yang mempunyai kekuasaan besar dan berkat kekuasaan itu, berada dalam posisi yang lebih kuat untuk mempertahankan kepentingan mereka, meskipun pada kenyataannya gambaran dari keadaan itu tidak selalu tampak jelas.

Sebagai gambaran, kekuasaan juragan dan bakul ikan dalam suatu masyarakat perikanan tampaknya sangat dominan terhadap nelayan maupun pembudidaya ikan, namun demikian para juragan dan bakul ikan tetaplah harus melakukan berbagai upaya agar ikatan *patron-klien* yang menguntungkan mereka tersebut tetap berlangsung. Salah satu cara tersebut adalah dengan selalu memberikan "bantuan" kepada kliennya, nelayan atau pembudidaya, setiap mereka meminta bantuan tersebut. Juragan atau bakul ikan yang tidak memberi "bantuan" tersebut dapat saja kehilangan kliennya karena beralih ke patron yang lain, yang mampu untuk memberikan bantuan yang diminta. Jadi siapa yang sesungguhnya berkuasa dalam kasus semacam ini?

Wawasan Kekuasaan dan Konflik bersifat lebih manusiawi daripada Wawasan Masyarakat dan Wawasan Sistem Sosial manakala proses dan

pengaturan kehidupan sosial juga dipandang sebagai hasil tindakan manusia dan bukan hanya sebagai akibat dari kekuatan impersonal dalam masyarakat atau sistem sosial semata. Tindakan dari pihak yang memiliki kekuasaan yang berusaha mempertahankan *status quo*, dan dari pihak yang tidak berkuasa yang berusaha menentangnya menyebabkan wawasan ini bersifat kurang deterministik. Kendatipun demikian, wawasan ini seyogyanya tidak dilihat sebagai suatu alternatif dari wawasan-wawasan "masyarakat" dan "sistem sosial", tetapi sebagai suatu pelengkap yang dibutuhkan oleh wawasan-wawasan tersebut.

Sebagai contoh, dari sifat saling melengkapi ini adalah dalam hal upaya kita menjawab pertanyaan: "Mengapa sebagian masyarakat ada yang mendukung atau sebaliknya tidak mematuhi (menentang) peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam kasus-kasus di masyarakat perikanan?". Untuk mampu menjawabnya, maka terlebih dahulu kita harus mampu memetakan dengan jelas kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Caranya adalah dengan melihat konflik yang potensial atau aktual yang ada di dalam masyarakat. Setelah itu barulah kita mulai mencoba untuk mempelajari agar dapat mengerti dan memahami tindakan kelompok-kelompok pembudidaya dan nelayan yang melakukan tindakan mendukung atau menentang peraturan tersebut.

F. WAWASAN INDIVIDUALISTIK

Berbeda dengan wawasan-wawasan sebelumnya yang memiliki konsep luas, Wawasan Individualistik sebaliknya lebih memperhatikan hal-hal yang sering tampak remeh, biasa, umum, dan bersifat sehari-hari dari gejala-gejala sosial. Dengan menganut wawasan ini, kita dapat menghabiskan waktu untuk mempelajari gejala-gejala sosial yang terpancar dari *konstruksi* individu, seperti misalnya di masyarakat perikanan tangkap adalah tingkah laku dari anak-anak serta keluarga nelayan yang bermain di pantai, hal-hal yang dilakukan seorang istri nelayan saat menyambut kedatangan suaminya sehabis melaut. Sementara di masyarakat perikanan budidaya dapat dicontohkan gejala-gejala sosial yang dipelajari melalui wawasan ini adalah tingkah laku petani atau pembudidaya tambak udang dalam mengisi waktu di siang hari selama mengelola areal usahanya (tambak udang), bagian pekerjaan apa yang dikerjakan oleh setiap individu dalam suatu keluarga pembudidaya ikan semasa panen, dan sebagainya.

Dengan demikian, tampak bahwa Wawasan Individualistik meneliti struktur masyarakat dengan bertitik tolak dari konstruksi individu-individu terhadap dunia sosialnya. Konstruksi ini mencakup pula penilaian seseorang terhadap kegiatannya sehari-hari, yaitu pandangan tentang tingkah laku apa yang pantas dan layak dalam situasi-situasi sosial sehari-hari. Sebagai contoh, wawasan ini digunakan sebagai dasar bagi kita untuk mempelajari tingkah laku seorang istri nelayan dalam menyambut suaminya di pinggir pantai sepulang suaminya pergi melaut. Sepertinya sesuatu hal yang kecil, namun sesungguhnya secara relevan terkait dengan kehidupan sosial masyarakat perikanan sebagai suatu informasi penting di dalam upaya pemberdayaan kaum perempuan pada masyarakat nelayan.

Wawasan ini juga mencakup pandangan-pandangan yang lebih makro tentang susunan dan pengaturan masyarakat yang dirancang untuk mengikuti suatu hierarki status sesuai dengan kemampuan dan tingkatan moral tertentu atau atas pembedaan antara yang kuat dan yang lemah. Sebagai contoh, betapa di dalam menyambut upacara Sedekahan Laut (syukuran), acara ritual selamatan atau syukuran yang umum diselenggarakan oleh masyarakat nelayan di wilayah pesisir, terdapat pembagian porsi atau besarnya sumbangan untuk kegiatan tersebut yang berlaku dengan sendirinya. Juragan kapal atau bakul ikan (menengah ke atas) akan memiliki kewajiban untuk menyumbang lebih besar dibandingkan dengan Anak Buah Kapal (ABK) atau nelayan buruh. Juragan yang tidak menyumbang (uang atau barang) dengan besaran yang semestinya akan merasa malu dan menjadi gunjingan masyarakat di lingkungannya, meskipun sesungguhnya pada saat itu hasil penjualan atau hasil tangkapan ikan dari kapal-kapal yang dimilikinya sedang tidak baik atau bahkan merugi.

Tingkah laku seseorang sehari-hari harus konsisten dengan pandangannya terhadap kedudukannya di dalam keteraturan sosial, dan terutama dengan pandangan-pandangan awam tentang susunan keteraturan sosial. Pernyataan ini dapat dijelaskan dari adanya pendapat bahwa nelayan (mungkin sebagian kecilnya) terkenal akrab dengan *kehidupan malam*, meskipun dari sisi latar belakang budayanya sesungguhnya merupakan masyarakat yang sangat taat pada ajaran agama, yang di dalam ajaran agama tersebut kegiatan "kehidupan malam" merupakan sesuatu hal yang dilarang. Kesimpulannya, manusia tidaklah bertingkah laku sesuai dengan tipe-tipe idealnya, tetapi bertindak berdasar pada pandangan dan penafsirannya tentang dunia sosial dan pandangannya tentang posisinya di situ.

Bagi yang tidak secara khusus mempelajari sosiologi, keteraturan sosial serta kegiatan sehari-hari individu-individu dalam suatu masyarakat semata-mata dipandang sebagai suatu kewajaran, artinya memang demikianlah seharusnya dan karena itu tidak perlu lagi dipersoalkan. Namun demikian, telaah mendalam terhadap hal-hal yang biasa dan umum dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya merupakan informasi penting yang dapat membantu untuk mengungkapkan hakikat yang sebenarnya dari keteraturan tindakan-tindakan tersebut, dan hal-hal ini ternyata berkaitan dengan keteraturan dari struktur masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, asumsi-asumsi yang diterima begitu saja oleh seseorang tentang pengaturan kehidupan sehari-hari dapat terbaca oleh kita sebagai faktor yang sangat mempengaruhi keputusan-keputusan menentukan dalam kehidupan individu-individu anggota masyarakat, misalnya keputusan mengenai jenjang pendidikan tertinggi bagi anak-anaknya. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk menerangkan pertanyaan: *Apakah anak, nelayan buruh, atau keluarga, juragan, yang lebih diharapkan oleh orangtuanya untuk dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik dan memang dipersiapkan untuk itu?*"

Di dalam Wawasan Individualistis, masyarakat hanya ada kalau "ia" dialami dan dimengerti oleh individu-individu. Hal-hal yang menentukan tingkah laku individu bukanlah semata-mata pengaruh-pengaruh sosial yang secara langsung membentuk dan memainkan individu seakan-akan ia sebuah boneka, melainkan persepsi dan penafsirannya tentang pengaruh-pengaruh ini. Dengan memusatkan perhatian pada penafsiran dan pendefinisian individu tentang situasi sosialnya, maka sebenarnya kita telah keluar dari determinisme yang kaku dari Wawasan Masyarakat dan Wawasan Sistem Sosial. Penafsiran-penafsiran itu datangnya dari individu, bukan dari masyarakat, walaupun diakui bahwa individu-individu ini masih tetap dibatasi oleh masyarakatnya. Lebih lanjut, interaksi antar individu dikarenakan individu tidak hanya bertindak sesuai dengan definisinya tentang situasi. Dalam tindakan-tindakannya, ia juga akan berusaha mempengaruhi cara orang lain dalam menafsirkan dan mendefinisikan sesuatu kejadian.

Hal ini dapat kita lihat dalam kegiatan sosial kita sehari-hari, di mana kita pun sering berusaha mempengaruhi orang lain agar menerima penafsiran dan definisi kita terhadap suatu situasi dan pandangan kita tentang posisi kita dalam situasi tersebut. Namun demikian, usaha itu tidak harus diartikan sebagai usaha untuk mendesak atau memaksa orang lain untuk setuju dengan pendapat kita.

Wawasan Individualistis bukan merupakan wawasan yang terbatas pada kehidupan sehari-hari yang sempit. Wawasan Individualistis juga mencakup pandangan tentang kehidupan sosial yang berasal dari penilaian dan penafsiran individu-individu lain, yang dapat diterapkan pada penggolongan-penggolongan berskala luas dan pranata-pranata dalam masyarakat. Sebagai contoh, pengertian kita tentang hubungan *patron-klien* antara juragan atau bakul dengan nelayan dipandang sebagai hubungan eksploitasi dari juragan ke nelayan. Namun demikian, bertambahnya pengalaman kita serta hasil-hasil penelitian tentang pola *patron-klien* tersebut saat ini sangat mempengaruhi pandangan kita yang terdahulu tentang sifat hubungan eksploitasi pada *patron-klien*.

Berhasil atau tidaknya mendeskripsikan situasi tertentu sangat terkait dengan pemahaman bahwa tindakan atau apa yang ada di diri seorang individu sangat menentukan ketepatan taksiran terhadap suatu situasi tertentu. Pengalaman individu tersebut tentang tindakannya sendiri dan tindakan-tindakan orang lain akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap cara penafsiran dan pengertiannya tentang kehidupan sosial.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan perbedaan mendasar masyarakat perikanan tangkap dengan masyarakat budidaya.
- 2) Jelaskanlah, mengapa terdapat keragaman ”reaksi” masyarakat terhadap program pembangunan?
- 3) Jelaskan definisi dari wawasan masyarakat
- 4) Jelaskan dua jenis interaksi antara unsur-unsur sistem sosial.
- 5) Mengapa wawasan kekuasaan dan konflik dianggap lebih manusiawi dibandingkan dengan wawasan masyarakat ataupun wawasan sistem sosial?
- 6) Uraikan hal-hal yang menentukan tingkah laku individu menurut wawasan individualistik.

Petunjuk Jawaban Latihan

Anda dapat menjawab soal-soal latihan tersebut dengan menguasai pokok-pokok bahasan berikut:

Pokok Bahasan	Soal No.
Terminologi Masyarakat Perikanan	1
Pentingnya Wawasan Kehidupan Sosial Masyarakat Perikanan	2
Wawasan Masyarakat	3
Wawasan Sistem Sosial	4
Wawasan Kekuasaan dan Konflik	5
Wawasan Individualistik	6

**RANGKUMAN**

Secara sederhana, masyarakat perikanan dapat dipahami sebagai suatu masyarakat yang tinggal dekat, hidup bersama dan menggantungkan kehidupannya pada sumber daya perikanan, baik perikanan perairan laut maupun perikanan perairan umum. Berdasarkan teknologi yang digunakan masyarakat perikanan lebih lanjut dibedakan menjadi masyarakat perikanan tangkap dan masyarakat perikanan budidaya.

Kehidupan sosial masyarakat perikanan merupakan salah satu informasi penting terkait dengan berbagai aspek sosial ekonomi masyarakat perikanan berdasar pada pembangunan perikanan berkelanjutan. Pemahaman terhadap kehidupan sosial masyarakat perikanan tersebut dapat diperoleh melalui wawasan mengenai kehidupan sosial masyarakat perikanan. Wawasan, yaitu sudut pandang atau cara untuk mengamati sesuatu, menatanya sedemikian rupa sehingga bermakna dan dapat dipahami dapat digunakan untuk memahami kehidupan sosial masyarakat perikanan.

Ada empat wawasan yang dapat digunakan, yaitu wawasan masyarakat, wawasan sistem sosial, wawasan kekuasaan dan konflik dan wawasan individualistik. Wawasan masyarakat adalah suatu cara pandang di mana masyarakat diposisikan sebagai institusi pemberi dan penentu peranan kepada semua anggota masyarakat. Wawasan sistem sosial yang merupakan pengembangan dari wawasan masyarakat dengan perbedaan pokok adalah adanya sistem yang memiliki kekuasaan dan kekuatan mengatur individu yang tak dapat digugat oleh individu yang bersangkutan. Wawasan kekuasaan dan konflik menekankan pada

pembagian kekuasaan di dalam masyarakat yang menentukan keteraturan sosial. Wawasan individualistis meneliti struktur masyarakat yang bertitik tolak dari konstruksi individu terhadap dunia sosialnya.

Penggunaan yang saling melengkapi dari keempat wawasan tersebut akan dapat mengarahkan kita pada suatu pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan sosial masyarakat perikanan yang utuh. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya dilakukan di tingkat masyarakat namun juga dilakukan di tingkat individu-individu sebagai anggota masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang kehidupan sosial masyarakat perikanan akan dapat dicapai melalui penerapan keempat wawasan tersebut, tidak hanya di tingkat masyarakat melainkan juga di tingkat individu. Hal-hal yang ditemukan dan sepertinya bertolak belakang tidak lain mencerminkan bahwa kehidupan sosial masyarakat perikanan merupakan sesuatu hal yang kompleks.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Masyarakat perikanan tangkap di Indonesia masih merupakan masyarakat yang
 - A. sumber penghidupan langsungnya adalah kegiatan di sektor perikanan
 - B. tingkat ketergantungannya terhadap alam dan sumber daya perikanan rendah
 - C. sangat mengandalkan regenerasi alamiah sumber daya perikanan serta daya dukung alam di sekitarnya.
 - D. memiliki hubungan sosial dengan masyarakat lainnya.

- 2) Pembangunan memiliki karakteristik antara lain
 - A. tidak mempengaruhi struktur dan tata nilai masyarakat
 - B. bersifat *top-down* dan selalu mendapatkan hasil yang sama antar daerah
 - C. dipengaruhi hasilnya oleh kemajemukan kondisi sosial ekonomi masyarakat
 - D. memerlukan data dan informasi kondisi sosial ekonomi di tahap perencanaannya.

- 3) Kurangnya pemahaman terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat perikanan di negara kita diakibatkan oleh
 - A. kemajemukan kehidupan sosial ekonomi masyarakat
 - B. belum banyaknya ahli ilmu sosial yang terlibat dalam proses pembangunan
 - C. merupakan bidang kajian yang tidak berkembang
 - D. lemahnya struktur dan dinamika reaksi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan

- 4) Wawasan yang digunakan dalam memahami kehidupan sosial masyarakat perikanan mengandung pernyataan
 - A. selalu bersifat parsial
 - B. suatu pengamatan yang tanpa ditata sedemikian rupa agar dapat bermakna dan dipahami hasilnya
 - C. sesuatu hasil pengamatan yang sifatnya komprehensif
 - D. tidak mencakup wawasan orang awam dalam kehidupan sehari-hari

- 5) Masyarakat dipandang sebagai institusi pemberi dan penentu semua peranan pada masing-masing anggotanya, merupakan konsepsi dari Wawasan
 - A. Individualistik
 - B. Sistem sosial
 - C. Masyarakat
 - D. Kekuasaan dan konflik

- 6) Terkait dengan pemahaman Wawasan Masyarakat, maka nelayan andon
 - A. anggota masyarakat yang terbebas dari segala aturan
 - B. merupakan nelayan yang menetap sementara di daerah atau wilayah lain
 - C. tidak memiliki pilihan kecuali menuruti aturan yang berlaku di daerah/wilayah yang mereka tinggali
 - D. harus mematuhi aturan yang berlaku di masyarakat setempat atau meninggalkan tempat tersebut

- 7) Pemahaman tentang Wawasan Sistem Sosial akan menunjukkan pada kita tentang
 - A. wawasan sistem sosial tidak serupa dengan wawasan masyarakat
 - B. adanya suatu sistem yang mengatur dan mengorganisir kehidupan sosial masyarakat
 - C. mempelajari tingkah laku masyarakat perikanan
 - D. pengaruh pengalaman individu.

- 8) Penyimpangan sosial pada hakikatnya adalah
- suatu bentuk ketidakseimbangan sistem sosial
 - sama dengan penyakit sosial
 - akibat adanya perubahan sosial yang disengaja
 - struktur masyarakat dengan berdasarkan konstruksi individu terhadap dunia sosialnya.
- 9) Terkait dengan pemahaman tentang wawasan, pernyataan berikut yang *tidak benar* adalah
- Wawasan Masyarakat menuntut adanya kepatuhan.
 - Wawasan Masyarakat dan Wawasan Sistem Sosial bersifat deterministik.
 - Wawasan Kekuasaan dan Konflik memfokuskan perhatian pada pembagian kekuasaan di dalam masyarakat.
 - Wawasan Kekuasaan dan Konflik memandang proses dan pengaturan kehidupan sosial sebagai hasil tindakan manusia semata.
- 10) Wawasan Individualistik, mencakup pengertian berikut, *kecuali*
- hanya memperhatikan hal-hal yang sering tampak remeh, biasa, umum dan sehari-hari dari gejala-gejala sosial
 - mempelajari tingkah laku masyarakat perikanan
 - meneliti struktur masyarakat dengan berdasarkan konstruksi individu-individu terhadap dunia sosialnya.
 - dipengaruhi pengalaman individu.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 2

Keteraturan Moral dalam Kehidupan Sosial

A. NORMA SEBAGAI ATURAN SOSIAL

Norma sosial (norma) adalah aturan-aturan sosial yang ditetapkan oleh masyarakat dan aturan-aturan prosedural untuk mengatur kenyataan sosial. Keterkaitannya dengan moral, norma mencerminkan peraturan moral yang langsung mengatur individu yang mana bersangkutan dapat memilih untuk menaatinya atau melanggarnya. Norma pada hakikatnya bersifat kemasyarakatan karena berkaitan dengan kehidupan sosial dan pada dasarnya merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, norma-norma sesungguhnya adalah bagian dari masyarakat, tumbuh dari proses kemasyarakatan dan menentukan batasan-batasan dari perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.

Individu yang dilahirkan dalam suatu masyarakat dan kemudian disosialisasikan untuk menerima aturan-aturan masyarakat (yang sudah ada sebelumnya) akan menginternalisasikan aturan-aturan dan menerima aturan-aturan itu sebagai standar tingkah laku yang benar dan yang salah. Perilaku tersebut dikendalikan oleh norma-norma tidak saja melalui rasa takut untuk merugikan sesamanya tetapi juga dengan melalui perasaan bersalah bila melanggar norma-norma tersebut.

Pada sekumpulan orang atau individu yang bersepakat membentuk organisasi sosial yang baru dan seperangkat aturan-aturan untuk organisasinya akan selalu dipengaruhi dan dibatasi oleh situasi norma-norma yang ada dalam masyarakatnya. Namun seiring dengan terorganisir dan berkembangnya organisasi itu akan menghasilkan norma-norma sendiri yang mungkin berhubungan langsung dengan aturan-aturan formal ataupun tidak. Anggotanya akan menyadari tingkah laku mana yang sesuai dengan kelompok dan mana yang tidak pada masyarakat luas. Pada masyarakat perikanan, bagian ini dapat diperjelas dengan contoh kasus pembentukan dan pengembangan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP M3) pada program pembangunan masyarakat nelayan di pesisir (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir – PEMP). Pengintroduksian organisasi ini beserta aturan-aturannya oleh pemerintah (*cq.* Departemen Kelautan dan Perikanan) haruslah didasarkan pada desakan sosial, yaitu

masyarakat memang secara sosial membutuhkan kehadirannya. Kemudian dalam pelaksanaannya harus pula diperhatikan bahwa aturan-aturan yang diterapkan akan dapat diterima oleh masyarakat luas, bagian masyarakat yang belum terlibat dalam program PEMP. Bila tidak, tentunya organisasi LEPP M3 ini akan dianggap memiliki aturan-aturan yang dianggap wajar di dalam organisasi tersebut tetapi dianggap *menyimpang* dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

B. NORMA SEBAGAI CITA-CITA DAN KENYATAAN

Uraian di atas menyinggung masalah norma dari sudut pandang masyarakat. Sebagai kelanjutannya, bagian ini sangat didominasi oleh penguraian norma dari sudut pandang individualistis, sebagai sesuatu bekal penting dalam menghadapi berbagai kesulitan untuk mendefinisikan dan mengamati norma-norma aktual (norma-norma subsisten) dari setiap masyarakat. Kesulitan ini muncul disebabkan norma-norma memiliki cakupan yang sangat luas dan jauh lebih luas daripada hukum-hukum formal tertulis seperti undang-undang dan aturan-aturan formal lainnya yang tertulis. Di samping itu, hukum-hukum formal tertulis terkadang juga tidak berhubungan dengan norma-norma kehidupan sosial. Bahkan di luar rumusan hukum formal sekalipun kita akan membuat kesalahan dalam menyamakan pernyataan-pernyataan lisan dari norma-norma sosial dengan norma-norma itu sendiri.

Sebagai penjelas, diberikan contoh pada ungkapan bahwa masyarakat nelayan itu boros dan karenanya mereka secara normatif melakukan kesalahan. Pandangan tersebut bukan dikarenakan secara faktual kita dapat melihatnya dalam aturan-aturan yang ada, namun lebih dikarenakan kita dapat melihat dari pelanggaran prinsip-prinsip atau norma-norma orang hemat, seperti penyesihan sebagian hasil kegiatan ekonominya untuk tujuan investasi atau keperluan hidup lainnya di saat musim tangkapan sedang tidak baik. Namun demikian, manakala kita menyimak kondisi nelayan yang memang berada di bawah garis kemiskinan disebabkan oleh desakan sosial, maka tidak ada gunanya bagi seseorang (nelayan) yang berinteraksi dengan orang lain (nelayan lainnya) untuk melarangnya melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dapat dikerjakannya. Artinya, ungkapan nelayan boros tersebut lebih dikarenakan fakta menunjukkan bahwa nelayan tidak mampu melakukan prinsip-prinsip atau norma-norma orang hemat karena memang ia

tidak mampu menyisihkan sebagian pendapatannya. Seluruh penghasilannya dihabiskan untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Secara ideal, dan ini merupakan suatu cita-cita, si nelayan menyadari bahwa dia perlu untuk hidup hemat tetapi kenyataanlah yang membuat ia tidak mampu untuk mengikuti norma-norma tersebut. Kepatuhan akan ungkapan *boros* menjadi sesuatu hasil dari keterbatasan fisik atau hambatan-hambatan lain dan bukan dari desakan-desakan dalam kehidupan sosial (contoh: keluarga dan lingkungan sekitar yang cenderung boros dan mengejar simbol-simbol kelas sosial dalam bentuk material).

Di samping ketidakmampuan seperti dicontohkan kasus di atas, harapan tentang cara bertingkah laku yang tidak mungkin dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari dapat juga terjadi karena aturan-aturan normatif sama sekali tidak berhubungan dengan norma aktual karena artinya yang sangat tidak jelas. Sebagai contoh, ungkapan nelayan *laut adalah rumah kedua* tidak akan tercermin pada pengaturan masyarakat sehari-hari, semisal adakah laut yang diatur seperti aturan-aturan aktual masyarakat terhadap rumah mereka. Oleh karena itu, penafsiran terhadap ungkapan tersebut akan sangat tergantung pada setiap individu nelayan. Bagi kita yang mendalami pengelolaan wilayah pesisir dan laut, mungkin pertanyaan ini akan sangat menggelitik untuk dikaji di kehidupan sosial masyarakat perikanan. Pertanyaan tersebut adalah "Adakah aturan-aturan aktual tentang pengaturan rumah pada masyarakat?" Jika ternyata ada, pertanyaan berikutnya yang muncul. *Dapatkah pengetahuan tersebut dijadikan dasar untuk mengkaji hubungan aturan-aturan aktual yang diperoleh dengan ungkapan "laut adalah rumah kedua"*

Lebih lanjut, tidak semua norma yang terdapat di dalam kehidupan sosial dinyatakan secara lisan. Kondisi ini menunjukkan bahwa seseorang dilingkupi oleh seperangkat norma yang begitu banyak. Seseorang tidak akan menyadari hal tersebut jika tidak menyadari telah melanggar norma-norma tersebut. Pada saat menyadarinya maka akan muncul pertanyaan terhadap hal-hal yang semula dianggapnya wajar. Sebagai contoh, seorang nelayan yang telah lama melakukan kegiatan *illegal fishing* (misal: menggunakan bom atau racun) tidak akan sadar bahwa tindakannya tersebut salah, kecuali ia disadarkan oleh berlakunya aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam diri si nelayan mungkin akan muncul pertanyaan apakah yang selama ini ia lakukan (*illegal fishing*) memang sesuatu tindakan yang benar atau salah. Kembali pada pernyataan sebelumnya, suatu perubahan

perilaku baru akan terjadi manakala ia mendapat desakan-desakan sosial dari lingkungan atau masyarakat disekitarnya.

C. SANKSI

Di bagian atas telah dikatakan bahwa anggota masyarakat menyadari norma-norma sosial setelah melanggar norma-norma tersebut. Bagi kita, pengenalan norma-norma sosial tersebut adalah dengan mengamati reaksi anggota masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran norma termasuk bagaimana mereka menjatuhkan sanksi dan hukuman terhadap pelanggar tersebut. Dengan kata lain, bagi seseorang yang bukan anggota masyarakat, pengenalan terhadap norma-norma sosial dari masyarakat dapat dilakukan melalui pemahaman terhadap sanksi-sanksi yang diberlakukan dalam masyarakat tersebut. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa unsur pokok dari suatu norma adalah tekanan sosial terhadap anggota-anggota masyarakat untuk menjalankan norma tersebut; dan sanksi adalah salah satu bentuk tekanan sosial dimaksud. Karenanya, dengan melihat sanksi-sanksi yang dimiliki norma-norma tertentu, kita dapat dengan jelas melihat seberapa kuat pengaruh norma tersebut dalam mengatur perilaku sosial.

Salah satu aplikasi dari pengetahuan tentang sanksi dalam pengkajian tentang norma adalah dalam hal mengidentifikasi hubungan antara keseragaman tingkah laku sosial dengan kesetiaan pada norma. Keseragaman tingkah laku individu-individu dalam kehidupan sosial dapat dianggap sebagai hasil dari keterikatan seluruh individu tersebut dengan norma-norma. Keseragaman tingkah laku memperlihatkan eksistensi dari norma-norma. Salah satu cara untuk menguji apakah keseragaman tingkah laku memang benar menggambarkan adanya kesetiaan pada norma, adalah dengan melihat apakah sanksi secara efektif diberlakukan terhadap setiap individu yang membuat tingkah laku yang menyimpang dari keseragaman tersebut.

Sifat dan kekuatan dari sanksi yang melekat pada norma-norma dapat dijadikan dasar mengklasifikasi norma-norma tersebut. Sebagai contoh pengklasifikasian norma yang dikaitkan dengan sanksinya adalah sebagai berikut (Soekanto, 2003).

1. Cara (*usage*); Norma ini lebih menonjol dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadap norma ini tidak mengakibatkan hukuman yang berat, hanya sekedar celaan dari individu yang dihubungnya.

2. Kebiasaan (*folkways*); Norma ini memiliki arti sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan maka akan dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat.
3. Tata kelakuan (*mores*); Norma ini terbentuk pada saat kebiasaan tidak dianggap sebagai cara perilaku saja, namun telah diterima sebagai norma-norma pengatur. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Tata kelakuan memaksakan suatu perbuatan tetapi di sisi lain melarangnya, sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut.
4. Adat-istiadat (*custom*); Norma ini akan terbentuk pada saat tata kelakuan bersifat kekal dan kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Anggota masyarakat yang melanggarnya akan mendapat sanksi yang keras yang terkadang secara tidak langsung diperlakukan berlanjut hingga ke generasi selanjutnya.

Sebagai contoh sanksi dalam suatu masyarakat perikanan dapat dilihat pada sistem Sasi masyarakat pesisir di Maluku Tengah. Sasi adalah suatu kesepakatan tradisional tentang pemanfaatan sumber daya alam yang disusun oleh masyarakat dan disahkan melalui mekanisme struktural adat di suatu desa. Sebagai layaknya sebuah peraturan, pada Sasi juga diatur tentang mekanisme sanksi apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Sasi. Jika terjadi pelanggaran Sasi maka orang yang bersangkutan akan ditangkap dan akan dijatuhi sanksi dengan cara membayar denda. Niki Juluw (1994) mengidentifikasi bahwa jika seseorang melakukan pembuangan jaring atau kegiatan lain yang mengharuskan berenang dan menyelam, maka orang tersebut didenda Rp25.000,00/orang; jika mengambil bia lola, batu laga, caping-caping, teripang, akar bahar/bunga karang, didenda Rp7.500,00/buah, batu, pasir dan kerikil, dendanya masing-masing Rp7.500,00/buah, Rp25.000,00/buah, Rp2.500,00/buah, Rp1.000,00/ekor, Rp5.000,00/pohon, Rp5.000,00/m³, Rp7.500,00/m³, dan Rp10.000,00/m³, sedangkan jika menangkap ikan dengan racun, maka didenda sebesar Rp100.000,00. Aturan ini hingga sekarang masih diterapkan dan berlaku

mengikat tidak hanya untuk seluruh anggota masyarakat bahkan untuk pihak luar yang memasuki wilayah laut yang berada di bawah pengelolaannya.

D. PROSES PELEMBAGAAN NORMA DAN KENDALANYA DALAM MASYARAKAT

Norma yang melembaga dan telah mencapai taraf pengakuan tertinggi dari masyarakat sesungguhnya merupakan aturan-aturan prosedural yang mengatur kehidupan sosial sehari-hari. Serangkaian norma penting tersebut tidak dinyatakan dalam pepatah-pepatah lisan, tidak disadari, dan telah dianggap biasa atau merupakan sesuatu yang dianggap sebagai kenyataan sosial. Kenyataan sosial tersebut terdefiniskan mengikuti tata cara yang didasarkan norma-norma dan terbentuk mengikuti sebuah kronologi. Dengan kata lain, pelembagaan suatu norma berdasarkan proses dan tingkatan pengakuannya, dimulai dari diketahui, dipahami, ditaati hingga pada akhirnya dihargai. Hal ini disebabkan kita mengaitkan kejadian yang satu dengan lainnya dan dengan lingkungannya dalam kerangka hubungan sebab akibat dan pada akhirnya kita beranggapan bahwa semua hal yang pernah terjadi akan terus terjadi di masa mendatang sehingga harus menjadi acuan bagi semua pihak.

Namun, perlu kita sadari bahwa perbedaan mendasar antara norma dengan individu terletak pada keterkaitan sosialnya. Norma-norma adalah produk masyarakat hasil dari interaksi sosial. Bagi individu, keteraturan normatif merupakan sesuatu yang utama dalam kehidupan sosial, yang berubah sejalan berlangsungnya kehidupan sosial tersebut dan pengalaman hidupnya. Norma-norma sosial berhadapan dengan perorangan, yang memiliki harapan-harapan individu. Karena tidak dirancang oleh dirinya sendiri, norma dipandang oleh individu sebagai sesuatu yang bersifat eksternal.

Meskipun merupakan sesuatu yang lebih terkait dengan individu, harapan-harapan tetap merupakan sebuah cerminan atau refleksi mekanis dari suatu norma. Dalam kehidupan sehari-hari, harapan-harapan kita terhadap orang lain dan sebaliknya harapan-harapan orang lain terhadap kita mencakup kegiatan yang lebih luas daripada apa yang dicakup oleh norma-norma itu sendiri. Namun demikian, harapan sering tidak sesuai dengan norma-norma yang ada disebabkan variasi persepsi dan interpretasi individu terhadap norma-norma. Penyimpangan *harapan-harapan* tersebut kadang

terlalu jauh sehingga, secara sadar atau tidak, bertentangan dengan norma-norma. Besarnya pertentangan antara *norma* dan *harapan individu* menunjukkan besarnya konflik atau hubungan dialektik antara masyarakat dan individu.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Uraikan definisi norma dari sudut pandang masyarakat
- 2) Uraikan batasan norma dari sudut pandang individualistik
- 3) Klasifikasikan norma berdasarkan sifat dan kekuatan sanksi yang melekatnya
- 4) Sebutkan ciri-ciri norma yang telah merupakan aturan-aturan prosedural yang mengatur kehidupan sosial sehari-hari.

Petunjuk Jawaban Latihan

Anda dapat menjawab soal-soal latihan tersebut dengan menguasai pokok-pokok bahasan berikut:

Pokok Bahasan	Soal No.
Norma Sebagai Aturan Sosial	1
Norma Sebagai Cita-cita + Kenyataan	2
Sanksi	3
Proses Pelembagaan Norma dan Kendalanya dalam Masyarakat	4



RANGKUMAN

Norma sosial (norma) dari sudut pandang masyarakat adalah aturan-aturan sosial yang ditetapkan oleh masyarakat. Norma yang melembaga dan jika telah mencapai taraf pengakuan tertinggi di masyarakat sesungguhnya merupakan aturan-aturan prosedural yang mengatur kehidupan sosial sehari-hari untuk mengatur kenyataan sosial. Dengan kata lain, norma merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat, tumbuh dari proses kemasyarakatan dan menentukan batasan-batasan dari

perilaku individu dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, norma dari sudut pandang individualistis merupakan aturan-aturan yang tidak disadari secara langsung mengenai dirinya, namun baru disadari dan karenanya akan merubah perilakunya manakala seseorang individu tersebut melanggarnya sehingga mendapat tekanan-tekanan sosial berupa sanksi dari lingkungan atau masyarakat di sekitarnya.

Pengenalan sanksi-sanksi yang berlaku di suatu masyarakat merupakan cara mengenali norma-norma di masyarakat tersebut dan seberapa kuat pengaruh norma dalam mengatur perilaku sosial. Berdasarkan sifat dan kekuatan dari sanksi yang melekat pada norma-norma, norma dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: 1) Cara atau *usage*, yaitu norma yang lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat dengan bentuk sanksi berupa celaan dari individu yang dihubungnya; 2) Kebiasaan atau *folksway*, yaitu suatu cara perilaku yang jika dilanggar memiliki sanksi berupa anggapan suatu penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat; 3) Tata kelakuan atau *mores*, perilaku yang mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya, baik secara sadar maupun tidak sadar; dan 4) Adat-istiadat atau *custom*, terbentuk pada saat tata kelakuan bersifat kekal dan kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Anggota masyarakat yang melanggarnya akan mendapat sanksi yang keras yang terkadang berlanjut hingga ke generasi selanjutnya.

Di tingkatan tertinggi, norma telah merupakan aturan-aturan prosedural yang mengatur kehidupan sosial sehari-hari dan memiliki ciri-ciri: 1) Tidak lagi dinyatakan dalam pepatah-pepatah lisan; 2) Sudah tidak disadari; 3) Dianggap biasa atau merupakan sesuatu yang dianggap sebagai kenyataan sosial yang terdefinisikan mengikuti tata cara yang didasarkan norma-norma; dan 4) Terbentuk mengikuti sebuah kronologi, yaitu dimulai dari tahap diketahui, dipahami, ditaati hingga pada akhirnya dihargai.

Adapun bagi individu, keteraturan normatif merupakan sesuatu yang utama dalam kehidupan sosial, yang berubah sejalan berlangsungnya kehidupan sosial tersebut dan pengalaman hidupnya. Karena tidak dirancang oleh dirinya sendiri, norma dipandang oleh individu sebagai sesuatu yang bersifat eksternal. Dalam hal ini, norma-norma berhadapan dengan perorangan yang memiliki harapan-harapan individu yang sebenarnya tetap merupakan sebuah cerminan atau refleksi mekanis dari suatu norma.



TES FORMATIF 2 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Norma pada hakikatnya mengandung pernyataan-pernyataan berikut, *kecuali*
 - A. selalu merupakan aturan-aturan sosial dan prosedural yang ditetapkan oleh masyarakat untuk mengatur kenyataan sosial
 - B. mencerminkan peraturan moral yang langsung mengatur individu untuk menaati atau melanggarnya
 - C. bagian dari masyarakat dan tumbuh dari proses kemasyarakatan
 - D. menentukan batasan-batasan dari perilaku individu dalam kehidupan masyarakat

- 2) Pernyataan yang merupakan hakikat norma dari sudut pandang individualistik adalah
 - A. bagian dari masyarakat dan tumbuh dari proses kemasyarakatan
 - B. mencerminkan peraturan moral yang langsung mengatur individu untuk menaati atau melanggarnya
 - C. baru disadari keberadaannya jika seseorang melanggarnya dan dikenakan sanksi oleh karenanya
 - D. menentukan batasan-batasan dari perilaku individu dalam kehidupan masyarakat

- 3) Dari sudut norma sebagai cita-cita dan kenyataan, maka ungkapan "nelayan boros" perlu disikapi dengan pernyataan
 - A. nelayan memang boros
 - B. nelayan belum tentu boros
 - C. perlunya kajian terhadap besarnya perbedaan antara norma normatif dengan norma aktual dalam suatu masyarakat
 - D. adanya pengejaran simbol kelas dalam bentuk material oleh nelayan

- 4) Norma yang jika dilanggar akan mendapatkan celaan dari individu yang dihubungi adalah
 - A. cara
 - B. kebiasaan
 - C. tata kelakuan
 - D. adat-istiadat

- 5) Jika pelanggaran terhadap sebuah norma dianggap sebagai sebuah penyimpangan, norma tersebut masuk dalam klasifikasi
- cara
 - kebiasaan
 - tata kelakuan
 - adat-istiadat
- 6) *Yang bukan* termasuk ciri-ciri suatu norma yang telah mencapai tingkatan tertinggi adalah
- merupakan aturan-aturan prosedural yang mengatur kehidupan sehari-hari
 - kenyataan sosial yang terdefiniskan dalam tatacara berdasarkan norma
 - tidak lagi dinyatakan dalam pepatah-pepatah lisan
 - terbentuk mengikuti sebuah tahapan kronologis, mulai dari diketahui hingga dipahami

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 3

Definisi dan Perspektif Sosial

A. MENDEFINISIKAN SITUASI

Kita dapat memahami lebih jauh pemikiran orang awam atas sesuatu yang dianggapnya wajar dengan cara menganalisis dan mencoba mengerti tingkah laku sosial individu secara lebih mendasar. Pemahaman atas berbagai macam tindakan individu akan kita miliki jika cara seseorang mendefinisikan situasi kita mengerti sebagai dasar bagi cara-cara ia bertindak dalam situasi tertentu. Individu, sebagai anggota masyarakat, memformulasikan penafsirannya sendiri tentang peristiwa dan tindakan-tindakan orang lain melalui pendefinisian situasi, meskipun ia akan selalu dipengaruhi norma-norma dalam rangka mendefinisikan elemen-elemen situasi dan dalam rangka mengevaluasinya. Dengan demikian, kehidupan sosial tergantung pada definisi situasi yang disepakati banyak orang (banyak individu). Dalam kerangka kehidupan sosial maka hubungan sosial sebagai pembentuk kehidupan sosial hanya terjadi jika seorang individu dalam berkomunikasi dengan orang lain memiliki asumsi bahwa perspektif (pandangan) orang lain tersebut tentang situasi memiliki kemiripan atau sesuai, paling tidak dalam hal-hal yang hakiki, dengan perspektifnya.

Sebagai contoh adalah saat kita berbicara dengan seorang pembudidaya ikan nila (*Tilapia* sp.) di suatu daerah mengenai perlunya menjaga kualitas perairan yang digunakan olehnya, dengan tujuan menjaga tingkat produktivitas hasil budidayanya. Sesuatu hal yang sia-sia jika pengertian tentang kualitas perairan yang dimiliki oleh kita dengan si pembudidaya tersebut tidaklah sama. Kasus lain yang menarik dari pemahaman terhadap Konsep Definisi Situasi ini adalah jika kita mengkaji pelaksanaan program pembangunan pemerintah pada masyarakat pesisir seperti program pemberdayaan masyarakat ataupun program rehabilitasi lingkungan perairan. Pengalaman di lapangan sering menunjukkan pada kita terungkapnya fakta berupa adanya persepsi dari masyarakat di daerah program bahwa program pembangunan tersebut merupakan kegiatan "bagi-bagi duit". Melalui pemahaman kita terhadap konsep ini maka kita memiliki bekal untuk dapat menguraikan penyebab terjadinya persepsi di masyarakat tersebut.

Contoh kasus lainnya adalah bagaimana kajian sosial masyarakat nelayan di Desa Gebang Mekar, Cirebon menunjukkan adanya kesalahan tafsir dari pengambil kebijakan program pembangunan terhadap kemampuan mengembalikan dana pinjaman untuk usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat nelayan. Kelompok ibu-ibu bakul ikan yang sebelumnya dianggap kurang mampu dan karenanya kurang layak mendapatkan dana pinjaman tersebut ternyata merupakan kelompok yang paling baik di dalam mengembalikan dana pinjaman yang dimaksud. Kondisi ini terjadi karena definisi situasi dari si pengambil kebijakan telah dimanipulasi sehingga si pengambil kebijakan mendapatkan gambaran situasi yang sesungguhnya berbeda dengan situasi sebenarnya, oleh sekelompok masyarakat yang menginginkan dan kemudian pada akhirnya berhasil mendapatkan dana pinjaman dari program tersebut. Oleh karena itu, agar terhindar dari kegagalan semacam ini maka sebagai pengambil kebijakan harus memahami betul situasi kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini juga akan menghindari kemungkinan salah persepsi sebagaimana dicontohkan ungkapan bahwa nelayan itu *boros*, karena mungkin tidak seluruhnya definisi situasi ini benar kiranya.

Dua elemen penting dalam Konsep Definisi Situasi adalah: a) *Relativity*, yaitu elemen yang mengacu pada asumsi seseorang tentang hubungan khusus antara komponen-komponen dalam suatu situasi; dan b) *Emergence*, yaitu elemen yang mengacu pada unsur waktu dalam definisi situasi. Perpaduan dua elemen ini menyiratkan bahwa definisi situasi yang kita peroleh saat ini tergantung pada pengertian terhadap situasi-situasi, yang berhubungan, yang terjadi lebih dahulu dan akibat dari situasi tersebut terhadap peristiwa yang akan datang. Pengertian ini menuntun kita pada jawaban atas persepsi masyarakat terhadap program pembangunan yang sepertinya merupakan suatu kegiatan "bagi-bagi duit". Perlu kita cermati bahwa pelaksanaan program pembangunan di daerah-daerah pedesaan sering kali menggunakan kata *bantuan* seperti Banpres (Bantuan Presiden). Dapatkah kita menghubungkan akibat dari penggunaan istilah tersebut di masa lalu terhadap persepsi "bagi-bagi duit" yang berlaku di masyarakat hingga saat ini?

Kasus-kasus di atas merupakan satu bukti lagi betapa pentingnya pembahasan atas kehidupan sosial masyarakat perikanan. Pemahaman tersebut tidak hanya untuk kondisi saat ini tetapi juga di masa lalu dan prediksi di masa depan, sebagai dasar bagi setiap pelaksanaan kegiatan

pembangunan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat perikanan itu sendiri.

B. KONSEP KELOMPOK REFERENSI DAN KONSEP KETERAMPASAN RELATIF

Bagi kita, pandangan atau wawasan yang digunakan dalam memahami kehidupan sosial masyarakat perikanan adalah bersifat obyektif. Sebaliknya, pandangan anggota suatu masyarakat perikanan terhadap kehidupan sosial yang terjadi pada masyarakatnya bersifat subyektif. Pandangan subyektif tersebut menunjukkan pada kita bahwa kenyataan kehidupan sosial adalah hasil penafsiran dan imajinasi dari anggota masyarakat tentang kehidupan sosial itu sendiri. Definisi-definisi, penafsiran dan imajinasi yang terbentuk pada individu ini adalah hasil dari kehidupan sosial dan distribusi kekuasaan yang terjadi pada masyarakat perikanan di mana ia hidup dan tinggal.

Berdasarkan pengertian di atas, dibutuhkan pemahaman atas Konsep Kelompok Referensi untuk dapat memahami suatu hubungan konseptual yang menghubungkan definisi situasi dengan struktur masyarakat. Pada dasarnya, konsep ini menjelaskan bahwa definisi situasi subyektif seseorang dibangun atas dasar pengaruh persepsinya tentang bagaimana orang lain mendefinisikan situasi mereka. Kelompok referensi dalam hal ini diartikan sebagai suatu kelompok individu yang memberikan kerangka berpikir atau referensi normatif atau standar moral kepada individu lain dalam pendefinisian situasi.

Konsep Kelompok Referensi memungkinkan kita untuk melihat bagaimana definisi situasi individu merupakan produk partisipasinya dalam kehidupan sosial. Definisi ini merupakan konstruksi subyektif dari individu itu sendiri. Tetapi, karena kehidupan sosial sangat tergantung pada definisi yang dianut bersama oleh anggota-anggotanya maka masing-masing dari individu dalam kelompok tersebut dalam membangun definisi situasinya sendiri akan dipengaruhi oleh persepsinya tentang bagaimana orang-orang lain mendefinisikan situasi mereka. Cara-cara definisi situasi orang lain mempengaruhi diri seseorang tersebut sangatlah beragam dan hal inilah yang membawa kita pada pentingnya pemahaman tentang kelompok referensi.

Secara umum dikenal dua jenis kelompok referensi, yaitu Kelompok Referensi Normatif dan Kelompok Referensi Komparatif. Kelompok referensi normatif didefinisikan sebagai suatu kelompok, baik bersifat nyata

ataupun imajiner, di mana individu-individu mengambil standar normatif dan standar moral. Dengan mengacu pada kelompok-kelompok tersebut, individu memasukkan unsur-unsur moral ke dalam suatu situasi. Jenis kelompok ini merupakan penentu dasar-dasar kepribadian dan sumber nilai bagi individu, baik yang menjadi anggota maupun bukan anggota kelompok.

Contoh kelompok referensi normatif adalah kajian terhadap seorang nelayan yang secara fisik sebenarnya merupakan anggota koperasi nelayan (KUD mina). Dengan menjadi anggota seharusnya tindakan ekonomi yang ia lakukan mengacu pada aturan-aturan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh KUD mina, seperti menjual hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan sistem lelang yang mana kemudian hasil penjualannya tersebut dipotong sebesar lima persen untuk dana operasional koperasi dan kesejahteraan nelayan di samping sebagian untuk retribusi pemerintah daerah. Namun mengapa pada kenyataannya tidak seluruh nelayan yang menjadi anggota koperasi melakukan hal tersebut. Alasan ini dapat kita temukan, yaitu dikarenakan jiwa dan pikiran si nelayan sesungguhnya tidak atau belum mengacu pada KUD mina di mana ia menjadi anggota. Mengapa si nelayan lebih mengacu pada kelompok nelayan yang terikat pada hubungan dengan juragan atau bakul ikan dalam ikatan berpola patron-klien? Kondisi inilah yang harus dapat kita jawab terkait dengan kenyataan bahwa si nelayan pada akhirnya secara aktual jarang atau bahkan tidak pernah aktif di dalam melakukan kegiatan ekonominya sesuai dengan aturan-aturan koperasi. Lebih lanjut, dapatkah kita bayangkan sesuatu yang terjadi aktual adalah kebalikan dari fakta umum yang terjadi di masyarakat perikanan pada saat ini? Dapatkah kita temukan seorang nelayan yang bukan anggota KUD mina bertingkah laku seperti layaknya seorang anggota KUD mina dimaksud? Jika jawabannya adalah ya, mampukah kita menganalisis bagaimana hal ini terjadi. Kuncinya adalah terletak pada pemahaman kita bahwa hal tersebut sangat tergantung pada perilaku setiap anggota KUD mina tersebut, tidak lain agar dapat dijadikan acuan oleh seorang individu yang secara fisik bukanlah anggota kelompok masyarakat tersebut.

Sementara itu, kelompok referensi komparatif adalah kelompok yang memberikan individu kerangka berpikir untuk mengevaluasi posisi sosialnya, dalam kaitannya dengan posisi sosial orang lain. Sebagai contoh, seorang juragan atau bakul ikan di desa akan menganggap posisinya istimewa jika kelompok referensinya adalah masyarakat desa setempat. Sebaliknya, jika kelompok referensinya adalah kelompok pengusaha perikanan di kota-kota

besar, maka ada kemungkinan si juragan atau bakul ikan tersebut akan menganggap dirinya sebagai orang yang belum berarti apa-apa. Contoh global adalah jika seorang nelayan atau pembudidaya ikan yang tergolong besar di Indonesia diberikan kesempatan untuk mengunjungi (studi banding) pelaku usaha perikanan yang sama di negara lain yang memiliki penguasaan teknologi jauh lebih baik, bagaimana tindakan mereka sepuluh dari kunjungannya tersebut yang kita harapkan kemudian terjadi? Berdasarkan penjelasan atas kedua contoh ini, penggunaan jenis kelompok referensi komparatif oleh individu karenanya dapat pula digunakan oleh kita sebagai dugaan awal tentang adanya hirarki dalam kehidupan sosial. Jika suatu kelompok referensi komparatif menunjukkan kriteria patokan aturan dan posisi individu di dalamnya, maka kegunaan kelompok referensi komparatif tergantung pada kerangka berpikir pokok yang mengatur kehidupan sosial dalam bentuk hirarkis. Dalam hal ini, kegunaan kelompok referensi komparatif mensyaratkan pula adanya ketidaksamaan sosial (*social inequality*).

Perbedaan antara kelompok referensi normatif dengan kelompok referensi komparatif dapat kita lihat juga pada pengertian bahwa posisi sosial dapat dibandingkan dari segi positif negatifnya atau dari segi menyenangkan atau tidak menyenangkan. Hal ini berbeda dengan norma, di mana norma hanya bisa diterima atau ditolak dan tidak untuk diperbandingkan. Seorang individu dapat menganggap posisinya lebih rendah dibandingkan yang lain, akan tetapi ia tidak bisa menganggap normanya lebih rendah daripada yang lain. Hal ini terjadi karena norma-norma yang dianutnya memberikan standar moral untuk mengatur tingkah lakunya dan dalam hal ini norma yang lain tidak cocok bagi dirinya. Sebagai contoh, seorang juragan bakul secara umum dianggap memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan juragan nelayan atau nelayan buruh. Namun demikian, kondisi ini bukan berarti menandakan bahwa juragan bakul tersebut memiliki norma yang lebih tinggi dibandingkan juragan nelayan atau nelayan buruh. Oleh karenanya, mungkin kita tidak dapat melihat seorang juragan nelayan bahkan nelayan buruh bertingkah laku layaknya seorang bakul ikan. Berdasarkan uraian dan contoh ini, kelompok referensi komparatif merupakan landasan untuk melakukan evaluasi. Dalam hal ini perbandingan-perbandingan dibuat atas dasar atribut-atribut sosial yang kita nilai, baik berupa kekayaan materi, kemampuan dan keahlian tertentu. Penilaian kelompok referensi komparatif karenanya mempunyai dua arti sekaligus, yaitu moral dan faktual. Terbentuknya arti

moral dipengaruhi oleh kelompok referensi normatif yang menjadi acuan. Pada intinya bagi seseorang individu, suatu kelompok tertentu harus menjadi kerangka berpikir sedangkan kelompok yang lain tidak.

Kelompok referensi dari sifat keanggotaannya dapat dibagi menjadi kelompok *Membership* dan *Non Membership*. Contoh kelompok *Membership* adalah KUD mina yang diikuti oleh nelayan pada contoh di atas. Kelompok ini memberikan seseorang identitas bagi dirinya dan memberikan dasar persepsi tentang adanya *non membership group* sebagai kelompok komparatif. Kelompok *Non Membership* dalam kasus ini adalah kelompok nelayan di luar koperasi yang memiliki pola hubungan patron-klien dengan juragan atau bakul ikan. Adapun hubungan antara kelompok referensi dengan kelompok *Non Membership* dapat diuraikan sebagai berikut (Soekanto, 2003).

1. *Bukan anggota* yang memenuhi syarat (disebut pula sebagai calon anggota) mempunyai kecenderungan untuk mengidentifikasi dirinya dengan kelompok, di mana kemudian dia menjadi anggota.
2. *Bukan anggota* yang bersikap masa bodoh, tidak menganggap kelompok sebagai kelompok referensinya.
3. *Bukan anggota* yang tetap tidak ingin menjadi anggota, tetap menganggap suatu kelompok sebagai kelompok referensinya.
4. Perbedaan antara bekas anggota dengan mereka yang bukan anggota adalah penting karena kenyataan bahwa pada umumnya bekas-bekas anggota tidak akan mau menganggap bekas kelompoknya sebagai kelompok referensinya lagi. Hal ini terjadi karena pada umumnya penanggalan keanggotaan didasarkan pada kenyataan adanya konflik antara kepentingan-kepentingan kelompok (baca: "pendefinisian situasi" yang beragam). Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam nilai-nilai dan pola-pola perilaku.

Konsep yang sangat terkait dengan Konsep Kelompok Referensi adalah Konsep Keterampasan Relatif, yaitu suatu konsep yang menunjukkan pentingnya landasan normatif bagi kelompok referensi komparatif. Keterampasan (*deprivation*) adalah perasaan yang timbul bila seseorang menyadari bahwa kondisi hidupnya mengalami kekurangan dalam beberapa hal yang ada pada diri orang lain, dan ia merasa bahwa seharusnya hal-hal itu harus juga dimilikinya. Keterampasan relatif karenanya merupakan suatu keterampasan yang dirasakan bila seseorang membandingkan dirinya dengan kelompok tertentu.

Hal yang menarik dari Konsep Keterampilan Relatif adalah karena konsep ini juga mengandung pengertian tentang ketimpangan sosial dan ketidakadilan sosial. Sebagai contoh, meskipun nelayan buruh menyadari adanya perbedaan antara keadaan ekonomi mereka dengan kemewahan ekonomi yang dimiliki oleh bakul ikan atau juragan bakul, namun perbedaan tersebut dipandang sebagai sesuatu yang benar dan sudah sewajarnya. Meskipun belum tentu semuanya benar, nelayan buruh ini tidak menyadari telah terjadi ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang menimpa mereka yang terindikasi dalam bentuk kecurangan saat penimbangan hasil tangkapan si nelayan yang dilakukan oleh bakul ikan atau terjadinya pembelian hasil tangkapan dengan harga yang telah ditentukan oleh si bakul. Penyebab terjadinya kondisi di atas adalah karena kelompok referensi komparatif seseorang dibatasi oleh ruang lingkup pengalaman sosialnya. Si nelayan belum memperoleh pengalaman di mana mereka mendapatkan timbangan atau harga jual yang sepantasnya mereka peroleh dari juragan bakul.

Contoh lain adalah masyarakat nelayan di Desa Sidodadi, Tegal yang sangat jelas menampakkan keinginan-keinginannya di masa depan untuk keluarganya sangat dibatasi oleh lingkup kelompok referensi komparatif di kalangannya. Jawaban yang umum diperoleh atas pertanyaan yang diajukan: "Apa yang bapak inginkan pada anak bapak saat besar nanti?" adalah "Ia bisa menjadi seorang anak buah kapal asing". Mereka memiliki pengalaman terbatas mengenai harapan mereka kepada anaknya setelah besar nanti. Pemikiran lebih maju juga terbukti masih dibayang-bayangi oleh pembatas tersebut. Bagi anak-anak dari keluarga nelayan yang relatif mampu untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dari tingkat pendidikan anak-anak pada umumnya (SD – SMP), ternyata masih lebih banyak diarahkan ke sekolah kejuruan pelayaran di kota Tegal. Harapan menyekolahkan anak mereka ke sekolah tersebut adalah pada saat setelah lulus mereka dapat diterima di kapal asing dengan gaji yang lebih tinggi daripada yang tidak memiliki ijazah sekolah tersebut. Bagi masyarakat ini, harapan kepada anak mereka seperti menjadi seorang guru, manajer perusahaan dan berbagai pekerjaan umum di kota-kota besar merupakan bagian dunia yang sepertinya tidak terjangkau oleh mereka.

Keterkaitan antara Konsep Kelompok Referensi dan Konsep Keterampilan Relatif merupakan bekal pemahaman kita mengenai "kelompok referensi normatif" sebagai suatu kelompok di mana individu mengambil standar moral dan norma-normanya, dan hal ini akan sangat

diperlukan pada bahasan mengenai *penyimpangan* dan *marjinalita*. Bahasan pertama, yaitu penyimpangan hanya sebatas menunjukkan keterkaitannya dengan kelompok referensi normatif. Penyimpangan dapat didefinisikan sebagai suatu ketidakpatuhan (*non-conformity*) dari individu terhadap norma-norma sosial yang ada dalam kelompok masyarakat di mana ia berperan dan ambil bagian di dalamnya. Berdasarkan definisi ini relevansi konsep kelompok referensi normatif terhadap kasus "penyimpangan" adalah bahwa konsep tersebut dapat memberikan perubahan nyata terhadap pandangan yang mengatakan bahwa penyimpangan semata-mata merupakan tindakan dari orang yang dianggap gagal untuk hidup dengan norma-norma yang ada. Penyimpangan yang dilakukan seseorang adalah lebih karena ia mengikuti norma-norma sosial yang "salah" dalam arti berbeda dengan norma-norma kelompok sosial di mana ia berada. Atau dengan kata lain, si pelaku penyimpangan telah memilih kelompok referensi normatif yang berbeda dengan orang-orang sekelompoknya, kelompok referensi yang menurut orang-orang sekelompoknya tersebut tidak patut diikuti. Adanya anggota masyarakat nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan jaring arad (semacam *trawl mini*), sedangkan di dalam masyarakat itu sendiri penggunaan alat tangkap semacam itu dilarang. Jika ditelusuri, ternyata penggunaan alat tangkap tersebut oleh si individu (nelayan) itu bermula dari pengalamannya melihat besarnya hasil tangkapan yang diperoleh kelompok nelayan di tempat lain dengan alat tangkap itu dibandingkan dengan alat tangkap yang umum digunakan oleh kelompok nelayan di dalam masyarakatnya.

Bahasan kedua, yaitu marjinalita dimulai dengan terjadinya suatu proses sosial yang disebut sebagai "sosialisasi antisipatif". Proses sosial ini menerangkan suatu proses yang terjadi pada seorang individu yang memakai norma-norma dari suatu kelompok tertentu agar ia bisa diterima dalam kelompok tersebut, sedangkan norma-norma itu sebenarnya bertentangan dengan norma dari kelompoknya sendiri. Kegagalannya di dalam mencapai tujuan dari proses sosial itu akan berakibat pada termarjinalkannya individu yang bersangkutan, yaitu manakala keinginan untuk pindah dari satu kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial yang lain membuat ia malah ditolak oleh kedua-duanya.

C. PERANAN DAN KONSEP KEDIRIAN

Sejauh ini, pusat perhatian kita lebih tertuju pada respons individu terhadap unsur-unsur situasi dalam hubungannya dengan dirinya. Perhatian kita tidaklah kepada definisi individu dalam kaitannya dengan unsur-unsur lain dalam suatu situasi. Pemahaman kita tentang *membership reference group* dapat kita manfaatkan untuk menyoroti definisi individu tentang dirinya, yang mencakup anggapan bahwa dirinya sebagai anggota kelompok tertentu seperti warga desa yang baik dan menganut norma-norma kelompok tersebut. Namun demikian, untuk dapat memperdalam hal ini lebih lanjut, kita harus membekali diri dengan pemahaman mengenai Konsep Peranan.

Konsep Peranan berguna untuk melihat hubungan struktur masyarakat dan individu. Hal ini dilandasi pemahaman bahwa perspektif "masyarakat" adalah bersifat deterministik dan pandangan tentang peranan sebagai "harapan-harapan" yang ditentukan oleh masyarakat terhadap individu juga merupakan pandangan yang deterministik. Sementara itu, pemahaman atas Konsep Peranan yang berasal dari perspektif individualistis akan menggambarkan suatu peranan yang bersifat "kesukarelaan" dan si pemegang peranan sebagai makhluk yang aktif dan kreatif. Kita akan mampu memahami individu sebagai aktor sosial yang aktif dan tidak hanya sebagai penafsir dari kenyataan sosial.

Bagi kita, peran manusia dapat dilihat melalui penyelesaian kewajiban-kewajiban sosial yang diperankannya. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, peran seseorang dapat dilihat dari bagaimana ia menunaikan kewajiban-kewajiban menurut posisi yang dipegangnya. Sebagai contoh, kewajiban individu dalam masyarakat perikanan jika ia memiliki posisi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, istri atau anak nelayan dan sebagainya. Berdasarkan uraian definisi tentang peranan ini, Gross, Mason dan McEachern *dalam* Berry (2003) kemudian mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Adapun harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sehingga dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Dengan kata lain, adanya harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran. Misalnya, harapan terhadap kaum perempuan oleh masyarakat nelayan pada umumnya adalah mampu memberi anak laki-laki pada sang suami. Anak lelaki sangat didambakan karena

diharapkan setelah besar nanti dapat membantu sang bapak bekerja. Oleh karena itu, selama sebuah keluarga belum dikaruniai seorang anak lelaki, sang istri akan senantiasa dituntut oleh sang suami, mertua dan saudara-saudaranya yang lain untuk mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Harapan-harapan itu tentunya harus sangat diperhitungkan oleh seorang perempuan di dalam masyarakat perikanan. Dipenuhinya peranan perempuan seperti yang diharapkan oleh keluarga di masyarakat perikanan ini merupakan salah satu jawaban bagi kita mengapa jumlah anggota keluarga di masyarakat nelayan rata-rata lebih dari empat orang.

Peranan juga mengandung harapan lain yang sifatnya berlawanan dengan harapan sebelumnya. Harapan ini adalah harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap "masyarakat" atau terhadap orang-orang yang berhubungan sewaktu ia menjalankan peranan atau kewajiban-kewajibannya. Sebagai contoh harapan seorang petambak udang terhadap pemerintah sewaktu udang dalam tambak yang dimilikinya diserang oleh penyakit putih. Ia mengharapkan peranan pemerintah sebagai pihak yang dapat memberikan jalan keluar atas kesulitan yang sedang dihadapinya ini. Di sisi lain ia berharap pula pada tenaga kerja yang dikaryakan olehnya untuk tetap bekerja mengolah tambak dengan baik, meskipun kemungkinan hasil panen tidak baik atau bahkan menemui kegagalan.

Pemikiran tentang peranan sebagai seperangkat harapan yang ditentukan oleh masyarakat terhadap pemegang-pemegang kedudukan sosial merupakan hal yang sejalan dengan perspektif "masyarakat", di mana dipandang bahwa setiap individu memainkan peranan yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka. Dalam pandangan ini, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat, misalnya peranan-peranan dalam pekerjaan, keluarga, kekuasaan dan peranan-peranan lain, yang diciptakan oleh "masyarakat" bagi manusia. Jadi, struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. Namun demikian, perlu diingat bahwa walaupun peranan adalah bagian dari struktur masyarakat, peranan-peranan hanya ada selama peranan-peranan itu diisi oleh individu. Misalnya, tidak akan ada peran seorang nelayan buruh jika tidak ada yang mengisinya. Oleh karenanya, juragan nelayan akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankannya agar peran tersebut tetap ada yang mengisi dengan harapan agar kapal miliknya dapat beroperasi menangkap ikan.

Upaya untuk dapat menganalisis peranan di dalam masyarakat haruslah dilandasi pada pemahaman kita tentang Konsep "Kedirian" (*self*). Kedirian

dapat kita artikan sebagai konsepsi individu terhadap dirinya sendiri dan konsepsi orang lain (*significant other*) terhadap dirinya. Kedirian dapat dianggap sebagai produk sosial, yang berarti bahwa diri kita sendiri berkembang dalam kerangka hubungan sosial kita di masyarakat.

Terkait dengan Konsep Kedirian, George Herbert Mead, seorang sosiolog berkebangsaan Amerika membagi "kedirian" atas 2 (dua) bagian, yaitu "Me" dan "I". "Me" merupakan refleksi kita terhadap kesan orang lain terhadap kita, yang kita peroleh dari penempatan diri kita sendiri dalam peranan orang-orang lain. Peranan-peranan tersebut tidak diartikan dalam konteks pribadi-pribadi tertentu saja, melainkan dari kelompok referensinya. Mead menambahkan bahwa proses "mengambil peran" (*role taking*) merupakan hal yang sangat fundamental dalam komunikasi sosial. Dengan begitu, kita harus mampu mengambil peran seorang individu dalam interaksi sosial pada masyarakat perikanan atau dengan kata lain "meminjam" sikap orang lain. Dengan begitu kita akan mampu untuk meramalkan tindakan balasan yang akan dilakukan oleh orang lain kepada kita. Sebagai contoh, dalam memahami peran seorang nelayan dalam masyarakatnya dapat kita lakukan dengan cara meminjam sikap mereka untuk kemudian berusaha untuk memahaminya tanpa harus mengambil alih peran orang lain sebagai miliknya. Pada saat itu kita tidak perlu menjadikan seorang individu nelayan sebagai acuan kita tetapi cukup kelompok nelayan di mana kelompok tersebut merupakan kelompok referensi bagi si nelayan yang menjadi fokus observasi kita.

Unsur "I" menegaskan bahwa diri seseorang juga merupakan hasil langsung dari tindakannya sendiri. "I", yang terdiri dari respons nyata dari individu terhadap sikap-sikap orang lain, merupakan elemen yang kreatif, spontan, dan tidak menentu atau tidak dapat diramalkan secara tepat. Tindakan manusia direncanakan oleh dirinya sendiri, tapi manusia tidak pernah yakin bahwa dirinya akan dapat melakukan tepat seperti yang diinginkan. Pada suatu saat kelompok nelayan, yang telah diberi bimbingan dan pelatihan untuk tidak lagi melakukan penangkapan ikan ilegal, menganggap diri mereka telah mampu untuk melakukan peran tersebut. Namun di saat lain timbul keraguan mereka pada kemampuan mereka tersebut dan pada akhirnya kembali melakukan penangkapan ikan ilegal.

Kejadian sehari-hari seperti kehilangan kendali terhadap diri sendiri, merasa rendah diri atau kurang yakin terhadap diri sendiri dan sebagainya menunjukkan "persimpangan" di dalam diri seseorang dan hanya dapat

dimengerti dengan memahami *kediriannya* terdiri dari *Me* dan *I*. Keyakinan akan berhasilnya usaha kelompok nelayan tersebut hanya dapat diwujudkan jika mereka melihat kembali tindakan tersebut sesudahnya. Oleh karena itu, penting bagi kita, apabila berperan sebagai tenaga pendamping lapangan, untuk selalu mengingatkan mereka betapa tindakan ekonomi yang mereka lakukan saat ini akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Hal ini dikarenakan hanya orang lainlah yang dapat melihat dan merasakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara langsung. Si nelayan merasakan tindakan-tindakannya sebagai bagian dari *Me* karena ia mengalaminya dengan melakukan refleksi terhadap tindakan-tindakan tersebut dan refleksi ini dipengaruhi oleh imajinasinya tentang tanggapan orang lain terhadap tindakan-tindakannya itu. Pada intinya, *I* di masa lalu menjadi *Me* di masa kini atau sekarang. Mead menegaskan bahwa *kedirian* merupakan suatu proses interaksi antara *I* dan *Me*. Komponen kembar dari *kedirian* ini menunjukkan perbedaan antara yang aktif dan pasif, yang bersifat pribadi dan bersifat sosial, yang spontan dan yang ditentukan, yang mengungkapkan ketegangan dan konflik antara individu dan masyarakat.

Dalam bahasa sehari-hari, kita membedakan *kedirian* yang sebenarnya dari seseorang dengan keadaan yang ingin ditumbuhkan terhadap dirinya, antara keadaan senyatanya dari seseorang dengan apa yang hendak ia tampilkan. Perbedaan ini terjadi antara cara pandang seseorang dan tentang dirinya sendiri atau antara pandangan kita (baca: orang atau pihak lain) dengan pandangan yang diharapkan oleh seorang individu tentang dirinya. Seorang individu yang mencitrakan diri dengan sesuatu yang tidak diyakininya, tidak pula akan berhasil meyakinkan orang lain meskipun ia berhasil mengesankan bahwa ia sendiri percaya pada citra diri tersebut. Kebingungan semacam ini muncul sering kali di kalangan para pejabat pemerintah manakala kedatangan mereka disambut dengan pandangan-pandangan negatif dari masyarakat nelayan yang mereka kunjungi, meskipun para pejabat tersebut merasa bahwa kedatangan mereka dengan citra baik, yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan yang dimaksud. Pemerintah dan masyarakat dalam hal ini tidak menyadari telah terjadi konflik yang diakibatkan perbedaan pada penentuan *kedirian* yang mereka bentuk masing-masing.

Konflik tersebut di atas menunjukkan bahwa *kedirian* merupakan hasil dari interaksi sosial. *Kedirian* dapat digunakan juga oleh pemiliknya dan juga

orang lain untuk mempengaruhi interaksi sosial. Sebagai contoh, *kedirian* yang dimiliki oleh para pejabat pemerintahan di instansi yang berwenang di bidang perikanan senantiasa berusaha dimasukkan melalui interaksinya dengan masyarakat. Mereka berupaya membuat citra diri sebagai pejabat yang peduli dengan kondisi kehidupan masyarakatnya dengan harapan keputusan-keputusan yang ditetapkannya akan diterima oleh masyarakat yang dimaksud. Sebagai kebalikan, terdapat pula masyarakat yang berupaya untuk mempengaruhi berbagai pihak, terutama pemerintah agar tampak sebagai masyarakat yang memang patut untuk mendapatkan program pembangunan.

Pada gilirannya, *kedirian* akan mengubah konsep individu tentang dirinya. Sebagai hasil dari interaksi sosial, gambaran tentang diri sendiri yang dimiliki oleh individu dan dimiliki oleh orang lain berasal dari penampilannya dalam peranan-peranan sosial. Untuk setiap peran yang dimainkan, individu mendapatkan kesempatan untuk memberikan gambaran yang sejalan dengan *kedirian*. Ini berarti bahwa citra diri individu secara keseluruhan merupakan penggabungan dari *kedirian* seorang individu di dalam berbagai peranan. Seorang pembudidaya ikan yang rajin berkonsultasi dengan penyuluh perikanan yang bertugas di wilayahnya mungkin akan dianggap oleh rekan-rekannya hanya sebagai orang yang menginginkan fasilitas dari instansi si penyuluh manakala nantinya ada program pengembangan usaha budidaya perikanan masuk ke wilayah mereka.

D. PERANAN DAN PENGENDALIAN KESAN

Dalam kehidupan yang sesungguhnya, peranan-peranan yang dibawakan oleh seseorang tidak bersifat pasti dan statis, melainkan selalu disesuaikan sepanjang proses interaksi sosial dan dipengaruhi oleh tindakan-tindakan dari si pemegang peran itu sendiri. Dalam konsep *kedirian*, diperlihatkan bagaimana *Me* yang pasif dan ditentukan oleh masyarakat diimbangi oleh "I" yang aktif dan spontan dari seorang individu. Hal tersebut sebenarnya serupa dengan konsep deterministik dari peranan yang ditetapkan oleh masyarakat untuk individu yang diimbangi dengan suatu konsepsi yang memperhitungkan tindakan spontan dari individu dalam menjalankan perannya dan perubahan dalam peranan-peranan dalam proses interaksi sosial. Terkait dengan hal ini, Turner *dalam* Barry (2003) mengemukakan suatu pendekatan lain yang melihat peranan lebih sebagai suatu proses dari

pengambilan peran (*role taking*) dibandingkan dengan sebagai sesuatu yang telah disusun dalam serangkaian harapan.

Konsep Kedirian mengungkapkan bahwa orang mempelajari kesan yang ditampilkan oleh orang lain dan mempertimbangkan pandangan orang terhadap perannya sendiri sebelum melakukan suatu tindakan. Terkait dengan pengungkapan ini, Konsep Pengambilan Peran yang diajukan Turner adalah berupa interaksi sosial yang dilihat sebagai suatu pelakonan sebuah peran (*role playing*) yang berdasarkan pada kesan seseorang terhadap peranan orang lain dan kesan seseorang terhadap kesan orang lain terhadap peranannya. Kesan-kesan itu didasarkan atas pengetahuan tentang tindakan-tindakan individu-individu yang dilakukan sebelumnya, dan juga berdasarkan norma-norma sosial. Artinya, definisi peranan seseorang akan selalu disesuaikan dengan tanggapan orang serta cara orang menampilkan peranan di dalam interaksi sosial sehari-hari.

Implikasi yang paling penting dari *role playing* adalah bahwa dengan menempatkan dirinya dalam peranan orang lain dan memperkirakan tingkah laku orang lain, maka seorang nelayan akan mampu membuat respon yang dituntut dalam rangka menampilkan sikap yang diinginkan oleh individu lain, misal penyuluh perikanan dalam rangka *illegal fishing* walaupun si nelayan tersebut sebenarnya masih melakukan kegiatan *illegal fishing* tersebut. Intinya, dalam *role playing* individu-individu belajar mengatur dan mengendalikan kesan yang mereka kembangkan untuk menampilkan respons-respons yang diharapkan oleh orang lain. Kita tidak perlu memandang bahwa *role playing* hanyalah suatu alat pengaturan kesan, mengingat bahwa pengaturan kesan adalah teknik dasar bagi seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri dalam interaksi sosial dan merupakan dasar dari proses komunikasi sosial.

Analisis tentang teknik pengendalian kesan dapat diimplementasikan oleh seorang penyuluh perikanan. Dalam memainkan peranan sebagai penyuluh perikanan, ia harus berusaha membawa suatu definisi situasi dan dapat membujuk para nelayan atau pembudidaya di wilayah yang ia bina untuk menerimanya, walaupun mereka tidak yakin pada definisi tersebut. Dalam proses ini si penyuluh perikanan dapat menggunakan bermacam-macam alat ekspresi, seperti kunjungan ke lokasi pembudidayaan ataupun beranjangsana ke tiap-tiap keluarga nelayan atau pembudidaya ikan. Di samping itu, ia juga harus mengatur apa-apa yang harus ditampilkan di bagian depan atau belakang dan bahkan bagian yang tidak perlu terlihat oleh

masyarakat. Dapat dicontohkan, bagian depan bagi seorang penyuluh perikanan adalah perilaku sehari-hari yang dilihat oleh masyarakat perikanan binaannya sedangkan bagian belakang adalah penyusunan konsep-konsep pendampingan atau penyuluhan dan mungkin saja mekanisme pengawasan terhadap kegiatan *illegal fishing*, penggunaan formalin untuk pengawetan ikan, atau penggunaan pestisida berlebihan dalam usaha tambak, dan sebagainya, untuk contoh dari bagian tidak perlu terlihat oleh masyarakat.

Pengurutan kegiatan bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan situasi yang ada. Misalnya, si penyuluh perikanan dapat saja melakukan pengumpulan informasi terlebih dahulu sebelum ia masuk ke dalam suatu masyarakat atau sebaliknya mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait dengan tugasnya dengan cara tinggal di masyarakat. Konsep tentang pengurutan depan dan belakang ini menunjukkan adanya situasi di mana kesan harus diatur secara hati-hati seperti untuk kegiatan pengawasan dan ada situasi lain di mana seorang penyuluh perikanan dapat santai dan bertindak sebagai "diri kita sendiri", seperti saat beranjangsana ke keluarga nelayan atau pembudidaya ikan dan diterima menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

E. KONFLIK PERANAN, JARAK PERANAN DAN ANALOGI DRAMATIK

Hal terpenting yang harus kita pahami dari perspektif "masyarakat" adalah bahwa peranan tidak lain adalah seperangkat harapan terhadap individu yang terkait dengan berbagai macam peranan sosialnya. Apabila seorang individu mengemban banyak peranan secara sekaligus, kemungkinan besar harapan-harapan tersebut tidak serasi sama sekali, atau bahkan beberapa di antaranya bertentangan satu sama lain. Di sinilah konflik peranan bermula. Konflik peranan itu sendiri menggambarkan suatu keadaan di mana individu dihadapkan oleh harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peran yang dimilikinya. Seorang nelayan pasti akan selalu berhadapan dengan konflik peranan manakala di satu sisi ia harus bekerja (menangkap ikan) terkait dengan perannya sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi nafkah keluarga, sementara di satu sisi ia juga harus menghadiri pertemuan kelompok nelayan terkait dengan perannya sebagai anggota kelompok masyarakat pengawasan sumber daya perairan di desanya tersebut. Wajar tentunya bila keadaan tersebut dihindari oleh kebanyakan

nelayan dengan berbagai caranya masing-masing. Wajar pula jika kita tahu bahwa pada mulanya si nelayan akan cenderung memilih pergi ke laut dibandingkan menghadiri pertemuan. Perubahan dapat terjadi manakala ketergantungan yang tinggi atas perannya sebagai tiang utama nafkah keluarga telah dapat dikurangi. Terkait dengan hal ini, kita secara tidak langsung mampu memahami betapa penting kajian gender dalam pemberdayaan ekonomi rumah tangga keluarga nelayan. Lebih lanjut, bila peranan dilihat sebagai suatu proses, yang secara terus menerus mengalami penyesuaian dalam interaksi sosial, maka penampilan peranan lebih merupakan suatu proses adaptasi diri seseorang pada peranan dan sebaliknya, daripada hanya sekedar kepatuhan atau penyimpangan terhadap peran tersebut.

Konsep Jarak Peranan (*role distance*) merupakan konsep yang dapat kita gunakan untuk melihat konflik-konflik nyata antara peranan dan kedirian. Jarak peranan diartikan sebagai suatu kesan yang ditonjolkan oleh individu bahwa ia tidak terlibat sepenuhnya atau tidak menerima definisi yang tercermin dalam penampilan perannya. Seseorang akan berusaha untuk menunjukkan beberapa ketidakcocokan antara peranan dan kediriannya. Umumnya individu dalam memilih peran di antara beberapa peran yang disandangnya adalah condong pada peran-peran yang terlibat di dalamnya tanggung jawab terhadap struktur masyarakat. Nelayan yang enggan pergi ke pertemuan dan memilih untuk pergi ke laut menangkap ikan adalah contoh betapa si nelayan mengambil jarak dengan peranan yang disandang dalam kelompok nelayan tersebut. Perilaku itu diakibatkan oleh si nelayan memiliki perasaan kurang terikat terhadap perannya itu. Penyatuan dengan peranan akan ditunjukkan oleh si nelayan dengan cara menunjukkan semua kemampuan-kemampuan yang diperlukan, misalnya mengetahui posisi-posisi terumbu karang yang perlu diawasi dan secara penuh melibatkan diri secara aktif dalam setiap kegiatan di kelompok nelayan.

Perlu dipahami bahwa penjelasan mengenai konsep peranan sebenarnya seperti menyamakan kenyataan sosial sesungguhnya dengan pentas drama. Kita lihat di dalam dunia nyata di mana seseorang memainkan peran-peran dramatik seperti misalnya peran sebagai nelayan, juragan nelayan, pedagang ikan, pembudidaya ikan dan sebagainya. Perbedaan dengan kejadian di pentas drama adalah bahwa dalam dunia sehari-hari para pemegang peranan mendapat naskahnya dalam bentuk harapan-harapan dari masyarakat.

Dengan menganalogikan pada apa yang terjadi di pentas drama, kita dapat melihat bahwa seorang individu anggota masyarakat yang bertindak sebagai "aktor" ternyata melakukan berbagai improvisasi dalam menjalankan peran yang telah ditentukan sesuai dengan "naskah" yang diberikan oleh masyarakatnya. Artinya, naskah yang sesungguhnya berupa harapan-harapan masyarakat terhadap seorang individu tidak lain hanya sebuah kerangka dari penampilan peran yang disandang individu yang dimaksud. Berikut adalah contoh yang akan membuat kita paham bahwa pemberian "naskah" tanpa memperhatikan si pemeran dapat berakibat pada *keterasingan* si pelaku dengan hakikat kemanusiaannya.

Masuknya pemerintah dengan suatu program pembangunan yang dilakukan atau diterapkan dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang kaku terhadap suatu kelompok masyarakat perikanan, pada akhirnya hanya akan dapat melihat suatu penampilan anggota kelompok tersebut yang berbeda dengan nilai-nilai sosial masyarakatnya sendiri. Ketidak hati-hatian semacam ini hanya akan menyebabkan individu-individu "terasing" dari dunianya dan mungkin saja akan menimbulkan konflik pada diri individu-individu atas perannya tersebut. Dapatkah kita perkirakan kemungkinan tindakan yang akan diambil oleh mereka kemudian manakala hal itu terjadi? Jawaban atas pertanyaan ini akan dapat kita peroleh saat kita memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan penggunaan konsep *keterasingan* dan *penyimpangan* dalam kehidupan sosial masyarakat perikanan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa asumsi yang menjadi syarat terjadinya hubungan sosial sebagai pembentuk kehidupan sosial?
- 2) Sebutkan dua elemen penting dalam konsep definisi situasi.
- 3) Bersifat apa wawasan yang digunakan dalam memahami kehidupan sosial masyarakat?
- 4) Apa yang dimaksud dengan konsep kelompok referensi normatif dan uraikan contoh konsep tersebut.

- 5) Apa kegunaan dari Konsep Peranan dalam melihat hubungan struktur masyarakat dan individu?
- 6) Jelaskan pengertian peranan menurut Turner?
- 7) Hal apa yang terungkap dari konsep kedirian?
- 8) Apa yang dimaksud dengan jarak peranan dalam konsep jarak peranan?

Petunjuk Jawaban Latihan

Anda dapat menjawab soal-soal latihan tersebut dengan menguasai pokok-pokok bahasan berikut:

Sub Pokok Bahasan	Soal No.
Mendefinisikan Situasi	1,2
Konsep Kelompok Referensi dan Konsep Keterampilan Relatif	3,4
Peranan dan Konsep Kedirian	5
Peranan dan Pengendalian Kesan	6,7
Konflik Peranan, Jarak Peranan dan Analogi Dramatik	8



RANGKUMAN

Kegiatan belajar ini membahas berbagai konsep yang terkait dengan upaya memahami bagaimana tingkah laku sosial seseorang di dalam masyarakat. Di tahap awal, diperlukan pemahaman atas Konsep Definisi Situasi yang menjelaskan bagaimana individu menginterpretasikan norma yang ada dan melalui cara apa norma serta keteraturan sosial dalam masyarakat dipertahankan serta diubah. Dua elemen penting dalam konsep ini adalah: 1) *relativity*, yaitu elemen yang mengacu pada asumsi seseorang tentang hubungan khusus antara komponen-komponen dalam suatu situasi; dan 2) *emergence*, yaitu elemen yang mengacu pada unsur waktu dalam definisi situasi. Perpaduan dua elemen ini dalam kehidupan sosial menyiratkan bahwa definisi situasi yang disepakati banyak individu saat ini tergantung pada pengertian terhadap situasi-situasi, yang berhubungan, yang terjadi lebih dahulu dan akibat dari situasi tersebut terhadap peristiwa yang akan datang.

Seseorang individu mendapat kerangka berpikir atau referensi normatif atau standar moral dari suatu kelompok referensi. Konsep Kelompok Referensi karenanya memiliki kegunaan: a) menjelaskan bahwa definisi situasi subyektif seseorang dibangun atas dasar pengaruh persepsinya tentang bagaimana orang lain mendefinisikan situasi

mereka; dan b) melihat bagaimana definisi situasi individu merupakan produk partisipasinya dalam kehidupan sosial yang karena sangat tergantung pada definisi yang dianut bersama oleh anggota-anggotanya, maka dalam membangun definisi situasinya sendiri, masing-masing individu dalam kelompok tersebut akan dipengaruhi oleh persepsinya tentang bagaimana orang-orang lain mendefinisikan situasi mereka, dan cara-cara definisi situasi orang lain mempengaruhi diri seseorang tersebut sangatlah beragam.

Terdapat dua jenis kelompok referensi, yaitu: 1) Kelompok referensi normatif, yaitu suatu kelompok bersifat nyata ataupun imajiner di mana individu-individu mengambil standar normatif dan standar moral ke dalam suatu situasi sehingga jenis kelompok ini adalah penentu dasar-dasar kepribadian seseorang dan sumber nilai bagi individu, yang menjadi anggota maupun bukan anggota kelompok. Kelompok referensi normatif menyangkut pada: *Penyimpangan*, yaitu tindakan dari orang yang dianggap "gagal" untuk hidup dengan norma-norma yang ada dikarenakan ia lebih mengikuti norma-norma atau kelompok referensi normatif yang berbeda dan tidak patut diikuti berdasarkan pada norma-norma atau kelompok sosial di mana ia berada; dan *Marjinalita*, yaitu gagalnya tujuan proses sosial seseorang individu berupa keinginan pindah ke kelompok sosial lain yang memiliki norma-norma yang berbeda dengan kelompoknya sendiri telah menyebabkannya ditolak, baik oleh kelompok sosial tujuan maupun kelompok sosial asalnya; dan 2) Kelompok referensi komparatif, yaitu kelompok yang memberikan individu kerangka berpikir untuk mengevaluasi posisi sosialnya terkait dengan posisi sosial orang lain.

Konsep peranan yang bersumber dari perspektif individualistis memiliki beberapa kegunaan, yaitu untuk: 1) Memahami individu sebagai aktor sosial yang aktif dan tidak hanya sebagai penafsir dari kenyataan sosial; 2) Melihat hubungan struktur masyarakat dan individu, di mana individu memiliki suatu peranan yang bersifat "kesukarelaan" dan si pemegang peranan sebagai makhluk yang aktif dan kreatif. Konsep ini terkait dengan konsep-konsep lain yang digunakan untuk menganalisis peranan seseorang di dalam masyarakat, yaitu Konsep Kedirian dan Konsep Pengambilan Peran (*Role Taking*).

Di dalam Konsep Kedirian, kedirian sebagai suatu konsepsi individu terhadap dirinya sendiri dan konsepsi orang lain (*significant other*) terhadap dirinya terdiri atas dua bagian yang saling berinteraksi, yaitu: 1) *Me*, yaitu refleksi yang timbul terhadap kesan orang lain terhadap kita; dan 2) *I*, yaitu bagian yang menegaskan bahwa diri seseorang juga merupakan hasil langsung dari tindakannya sendiri. Sebagai respons nyata dari individu terhadap sikap-sikap orang lain merupakan elemen

yang kreatif, spontan dan tidak menentu atau tidak dapat diramalkan secara tepat. Oleh karena itu, *I* di masa lalu menjadi *Me* di masa kini atau sekarang.

Adapun Konsep Pengambilan Peran membahas peranan seseorang di dalam masyarakat melalui interaksi sosial yang dilihat sebagai suatu pelakonan sebuah peran (*role playing*) yang berdasarkan pada kesan seseorang terhadap peranan orang lain dan kesan seseorang terhadap kesan orang lain terhadap peranannya. Kesan-kesan itu didasarkan atas pengetahuan tentang tindakan-tindakan individu-individu yang dilakukan sebelumnya, dan juga berdasarkan norma-norma sosial. Artinya, definisi peranan seseorang akan selalu disesuaikan dengan tanggapan orang serta cara orang menampilkan peranan di dalam interaksi sosial sehari-hari.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pemikiran orang awam akan sesuatu yang dianggap wajar dapat dipahami melalui
 - A. kajian dan pemahaman tentang tingkah laku sosial individu
 - B. pemahaman tentang pendefinisian situasi oleh individu
 - C. adanya perbedaan persepsi
 - D. konsep definisi situasi

- 2) *Relativity* adalah elemen penting dalam konsep
 - A. Definisi Situasi
 - B. kelompok Referensi
 - C. Keterampasan Relatif
 - D. Kedirian

- 3) Pandangan kita dalam memahami kehidupan sosial masyarakat perikanan menunjukkan
 - A. adanya perbedaan pandangan antara kita dengan masyarakat perikanan
 - B. kehidupan sosial merupakan hasil penafsiran dan imajinasi anggota masyarakat tentang kehidupan sosial itu sendiri
 - C. adanya pengaruh distribusi kekuasaan pada masyarakat perikanan
 - D. perlunya pemahaman tentang Konsep Kelompok Referensi

- 4) Seorang nelayan anggota KUD mina tidak menjalankan aturan organisasi yang diikutinya. Ia memilih untuk menjalankan jual-beli hasil tangkapannya dengan juragan bakul. Kelompok referensi normatifnya adalah
- KUD mina
 - Juragan bakul
 - Pemerintah daerah
 - Kelompok nelayan lainnya
- 5) Pelaksanaan studi banding dalam program pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan salah satu hasil pemahaman atas konsep
- Kelompok Referensi Normatif
 - Kelompok Referensi Komparatif
 - Kelompok *Membership*
 - Kelompok *Non-membership*
- 6) Konsep Peranan mengandung beberapa pokok pemikiran berikut, *kecuali*
- konsep Peranan dapat dipandang dari sudut masyarakat maupun individual
 - adanya seperangkat harapan yang dikenakan pada individu terkait dengan kedudukan sosialnya
 - harapan yang dikenakan pada individu sama kedudukannya dengan norma
 - individu adalah aktor sosial yang aktif
- 7) Unsur "Me" dalam kedirian manusia menunjukkan
- refleksi kita terhadap kesan orang lain terhadap kita melalui pemahaman atas kedudukan orang-orang lain dalam masyarakat
 - acuan kita dalam memahami kehidupan sosial masyarakat adalah seorang nelayan
 - adanya proses pengambilan peran dengan cara melaksanakan peran
 - pemahaman peran seseorang dalam masyarakat dengan cara "meminjam" sikap orang lain

- 8) Pemahaman sepenuhnya terhadap Konsep Pengambilan Peran yang dikembangkan oleh Turner oleh tenaga penyuluh perikanan maupun pendamping masyarakat perikanan belum cukup bagi mereka untuk dapat
- A. meyakinkan masyarakat binaannya untuk mengikuti ajakannya
 - B. menyusun suatu rencana kegiatan pendampingan masyarakat
 - C. mengawasi tingkah laku anggota masyarakat binaannya
 - D. memperkirakan tingkah laku anggota masyarakat melalui peran yang dimilikinya
- 9) Dari berbagai pernyataan berikut, yang *tidak* tercakup dalam kajian Konsep Jarak Peranan adalah
- A. konflik terjadi karena seseorang mengemban banyak peranan
 - B. pelakonan peran dapat diartikan sebagai suatu kepatuhan individu yang bersangkutan
 - C. terjadinya improvisasi oleh individu yang melakonkan peran yang telah ditentukan oleh masyarakat
 - D. keengganan seorang nelayan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan yang merupakan suatu pengambilan jarak peranan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 4. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 4

Peranan-peranan Sosial dan Ketimpangan Sosial

A. KETERASINGAN DAN PERANAN-PERANAN SOSIAL

Secara sangat sederhana kita dapat mengatakan bahwa seseorang yang tidak dapat mengidentifikasi dirinya dengan peranan yang ia mainkan, maka ia terasing dari peranan tersebut. Namun seperti akan kita lihat, bahwa perumusan sederhana seperti itu mengandung penggunaan yang sangat berlawanan dari *keterasingan*. Sebagai contoh, *keterasingan* di masyarakat perikanan dari aspek politik dengan ekonomi adalah pandangan umum dari berbagai masyarakat perikanan tangkap di negara kita bahwa siapa pun pimpinannya akan diterima asalkan benar-benar meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini terjadi mungkin karena masyarakat yang "terasing" tersebut berpikir bahwa siapa pun pilihannya tidak akan mempengaruhi kehidupan mereka, atau mungkin karena ia berpikir bahwa tidak ada pilihan yang baik; semua kelihatannya sama saja.

Dilihat dari segi manapun *keterasingan* seperti ini merupakan gejala buruk dalam kehidupan masyarakat tersebut. Namun masalah tersebut dapat dilihat dengan cara yang sangat berbeda. Sering kali masalah tersebut dilihat sebagai salah satu dari kemampuan sistem politik-ekonomi untuk mengatasi keterasingan. Jika terlalu banyak orang berpandangan demikian maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana sistem yang ada harus dapat mengatasi permasalahan dari orang-orang yang "terasing" dan bukan sebaliknya. Sistem perlu disesuaikan di sana sini untuk menjamin agar cukup banyak orang tergerak untuk melakukan apa yang dituntut bagi kelangsungan sistem tersebut. Artinya, cukup banyak orang yang puas dengan sistem yang ada sekarang. Satu penyesuaian yang mungkin perlu dikaji adalah bagaimana sistem pengambilan keputusan yang berlaku di dalam masyarakat perikanan pada saat ini, apakah sudah dapat dipahami oleh seluruh masyarakat ataukah belum. Selanjutnya, apakah keputusan-keputusan yang diambil telah dapat mewakili aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan mereka dari sisi ekonomi.

Jika pendekatan terhadap Konsep Keterasingan semacam ini dilihat dari sudut analisis peranan, maka tampaknya *keterasingan* hanya dapat terjadi

ketika orang-orang dengan terpaksa menerima peranan yang telah dipersiapkan untuk mereka dan menanyakan pertanyaan janggal serta mengajukan permintaan janggal pula seperti pertanyaan apakah sistem tersebut akan memberikan keuntungan yang seharusnya mereka terima. Namun, perlu diperhatikan pula kemungkinan bahwa keterasingan terjadi tatkala sistem berhadapan dengan orang-orang yang tidak dapat dikendalikan oleh sistem tersebut. Pernyataan ini memiliki arti bahwa orang yang tidak memberi suara adalah terasing, bukan karena ia tidak puas dengan sistem tersebut tetapi karena sistem tersebut berhadapan dengan dia sebagai suatu unsur luar, di mana dia tidak dapat mengendalikannya dan dia tidak memiliki bagian di dalamnya.

Sebuah contoh nyata dari keterasingan ekonomi kiranya akan membantu. Seorang nelayan yang merupakan anggota koperasi mina mengeluh tentang bagaimana dia dan sesamanya diperlakukan oleh lembaga tersebut. Mereka merasa keputusan-keputusan yang diambil tidak melibatkan mereka sebagai anggota. Ia merasa tidak ada imbalan yang pantas bagi ia dan kelompoknya. Koperasi mina kemudian dilihat sebagai kekuatan *impersonal*, berada di atas anggota-anggotanya sebagai individu, meskipun harusnya disadari bahwa lembaga itu hanyalah sebagai suatu organisasi yang tidak lebih dari hubungan sosial antara anggota-anggotanya. Bagi dia hubungan-hubungan tersebut kini telah diubah ke dalam suatu satuan yang terasa asing yakni "lembaga", walaupun sebenarnya lembaga tersebut adalah hasil dari dia dan orang-orang semacam dia. Hal ini terjadi manakala pembentukan KUD mina tidak sesuai dengan prosedur yang benar dan pada intinya tidak mewakili masyarakat nelayan itu sendiri. Contoh kasus ini dapat kita jadikan bahan kajian atas kondisi saat ini di mana kita ketahui banyak KUD mina pada saat ini pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan alasan ekonomi yang terkadang tidak bersesuaian, antara kebutuhan ekonomi regional dengan ekonomi lokal.

Dalam kasus lain juga terungkap bahwa Konsep Keterasingan akan sangat menonjol pada kajian terhadap kehidupan yang hanya dianggap sebagai instrumental atau alat untuk mencapai tujuan hidup. Di masyarakat nelayan yang mengukur seluruh rutinitas sehari-harinya dengan nilai uang, telah menyebabkannya *terasing*. Nelayan akan cenderung untuk pergi ke laut dengan alasan mencari nafkah dibandingkan dengan melakukan kegiatan sosial berupa gotong-royong membersihkan lingkungan pemukimannya. Begitu pula dengan pembudidaya ikan kerapu yang tinggal di tengah laut,

tidak hanya secara moral namun juga secara fisik nyata-nyata ia adalah orang *terasing*.

Kedua kasus di atas membawa kita pada suatu intisari dari Konsep Keterasingan, yaitu *keterasingan* akan terjadi manakala sistem yang ada mendikte kegiatan-kegiatan manusia. Hubungan antar manusia hanya dijadikan semacam proses belaka, tidak ada sentuhan terhadap nilai-nilai maupun norma-norma yang terkandung dan sesungguhnya merupakan rujukan dari kehidupan sosial individu-individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, terbukti bagi kita bahwa pelaksanaan program pembangunan di suatu masyarakat, termasuk masyarakat perikanan dalam hal ini dan mengabaikan nilai-nilai sosial budaya yang dirujuk oleh masyarakat yang bersangkutan pada akhirnya hanya akan menyebabkan *keterasingan* masyarakat tersebut. Dilihat dari keterasingan sebagai sumber dari penyimpangan-penyimpangan sosial, tidaklah mengherankan jika kemudian muncul banyak permasalahan sosial di masyarakat perikanan.

B. PENYIMPANGAN DAN PELAKONAN PERAN

Penyimpangan secara sangat sederhana didefinisikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma. Melalui norma-norma, masyarakat mendefinisikan penyimpangan dan karenanya penyimpangan muncul dari perspektif masyarakat. Dengan kata lain, tanpa norma tidak akan ada penyimpangan. Sebagai contoh, kebiasaan masyarakat nelayan untuk melarung kepala kerbau setiap tahunnya dalam kegiatan sedekahan laut sebagai tanda syukur atas nikmat yang telah diperoleh, mungkin oleh sebagian masyarakat lainnya tradisi tersebut dianggap sebagai penyimpangan. Kasus ini menunjukkan bahwa terjadinya penyimpangan dalam lingkungan sosial bukan hanya karena lemahnya keterkaitan masyarakat dengan norma-norma sosial. Penyimpangan terjadi karena sebagian masyarakat (yang memilih melanjutkan tradisi) memiliki “standar” yang berbeda dengan yang dimiliki oleh sebagian lain masyarakat yang menolak tradisi tersebut dengan alasan keagamaan. Pelaku-pelaku penyimpangan adalah orang-orang yang memiliki kelompok-kelompok acuan yang berbeda dari kelompok yang diterima orang lain. Dengan kata lain, uraian ini membawa kita pada penjelasan atas hubungan antara penyimpangan dengan konsep kelompok referensi.

Dalam hubungan dengan pelakonan peran atau *role playing* diketahui terdapat dua hal yang dapat menyebabkan penyimpangan. Hal pertama adalah penyimpangan yang dikarenakan si pelaku adalah seseorang yang gagal memenuhi harapan-harapan pada perannya. Seorang nelayan yang melakukan *illegal fishing* akan membela diri dengan mengatakan usaha tersebut dilakukan untuk dapat memenuhi nafkah keluarganya. Dalam hal ini perbuatan buruk yang tidak diharapkan oleh pihak-pihak tertentu (pemerintah atau pemerhati lingkungan) di sisi lain merupakan upayanya untuk memenuhi harapan dari pihak yang lain (keluarganya). Tampak bahwa penyimpangan yang dilakukan olehnya hanyalah pada sektor tertentu dalam peranan-peranan yang dilakoninya sebagai seorang nelayan. Mungkin kita akan dapat merenungkan dengan demikian arti pentingnya mata pencaharian alternatif bagi si nelayan dalam kasus seperti ini. Hal kedua adalah bahwa beberapa bentuk dari penyimpangan merupakan hasil dari peranan-peranan yang memang menyimpang. Sebagai contoh adalah prostitusi di masyarakat pesisir dengan alasan yang sama dengan nelayan pada kasus di atas, yaitu untuk memenuhi nafkah, secara nyata merupakan peranan yang menyimpang dikarenakan tidak satu pun agama membolehkan hal tersebut. Peranan menyimpang ini lahir dari lingkungan sosial yang menyimpang, yaitu tidak adanya atau rendahnya ikatan dari norma-norma masyarakat.

Tekanan-tekanan sosial dan harapan-harapan sosial sering kali cenderung mengukuhkan si pelaku penyimpangan di dalam penyimpangannya. Seorang yang melakukan *illegal fishing* dan pelacur di wilayah pesisir tidak akan dengan mudah meninggalkan pekerjaannya itu. Penyimpangan di tingkatan komunitas dapat juga didorong oleh kelompok-kelompok luar, yakni mereka yang tidak mau menerima individu yang berusaha meninggalkan komunitasnya yang menyimpang. Sebagai contoh, pelaku *illegal fishing* akan terus melakukan perbuatannya bilamana pemasok bahan-bahan peledak atau racun ikan masih ada. Penyimpangan juga dapat terjadi sepanjang masih ditolerir oleh masyarakat sehingga dengan kata lain penyimpangan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Terjadi atau tidaknya penyimpangan juga dapat dipengaruhi oleh posisi seseorang. Seorang juragan bakul tidak akan dianggap melakukan penyimpangan meskipun ia "mengakali" timbangan ikannya sepanjang tindakannya tersebut masih ditolerir oleh para nelayan kliennya dan sepanjang ia masih dianggap sebagai seorang patron bagi mereka.

Terkait dengan penyimpangan, Merton *dalam* Soekanto (2003) menyusun suatu tabel yang menggambarkan usaha-usaha individu sebagai anggota masyarakat untuk menyetarakan dirinya dengan nilai-nilai sosial dan kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat untuk mencapai nilai-nilai sosial tersebut. Pola-pola penyetaraan atau sebaliknya penyimpangan tersebut tergambar di dalam tabel berikut:

Bentuk-bentuk Usaha Penyetaraan	Nilai Sosial	Cara-cara (norma) yang Telah Melembaga
1. Kepatuhan (<i>conformity</i>)	+	+
2. Inovasi (<i>innovation</i>)	+	-
3. Ritualisme (<i>ritualism</i>)	-	+
4. Retreatisme (<i>retreatism</i>)	-	-
5. Pemberontakan (<i>rebellion</i>)	±	±

Sumber: Merton dalam Soekanto (2003)

Keterangan: + = warga masyarakat menerima nilai-nilai atau norma-norma yang ada

- = warga masyarakat menolak nilai-nilai atau norma-norma yang ada

± = pola-pola perilaku yang menolak dan menghendaki nilai-nilai dan norma-norma yang baru

C. KETERASINGAN DAN PENYIMPANGAN

Bagian ini membahas hubungan antara Konsep Keterasingan dan Konsep Penyimpangan. Teori *anomie* dapat menjadi titik awal untuk menarik suatu hubungan antara kedua konsep tersebut. Anomie dapat diartikan sebagai suatu keadaan sosial dalam mana keterikatan pada aturan-aturan normatif sangat lemah. Merton *dalam* Barry (2003) mengemukakan anomie sebagai suatu keadaan dari struktur sosial di mana terdapat beberapa ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang diakui secara budaya dan cara-cara yang diakui untuk pencapaian nilai-nilai ini. Anomie terjadi di mana penekanan yang berlebihan diletakkan pada suatu pilihan dengan mengorbankan yang lain.

Penekanan pada pencapaian tujuan ekonomi misalnya, mungkin akan cenderung menyebabkan sedikitnya perhatian pada sah atau tidaknya cara-cara yang dipergunakan sebagaimana dicontohkan oleh nelayan yang

melakukan *illegal fishing* ataupun pelacur di wilayah pesisir. Pada saat tujuan ekonomi dengan segala cara tersebut dilakukan dan kehidupan hanyalah merupakan instrumental dalam mencapai suatu tujuan, maka sesungguhnya individu pelaku penyimpangan ini juga telah mengalami suatu keterasingan. Seperti dicontohkan pada bagian pertama, di masyarakat nelayan yang mengukur seluruh rutinitas sehari-harinya dengan nilai uang, telah menyebabkannya *terasing*. Nelayan akan cenderung untuk pergi ke laut dengan alasan mencari nafkah dibandingkan dengan melakukan kegiatan sosial berupa gotong royong membersihkan lingkungan permukimannya. Begitu pula dengan pembudidaya ikan kerapu yang tinggal di tengah laut, tidak hanya secara moral namun juga secara fisik nyata-nyata ia adalah orang "terasing". Lebih lanjut, manakala seorang pelaku penyimpangan menerima "definisi sosial" tentang dirinya tersebut, hal ini mengindikasikan suatu *keterasingan* yang akut. Perlu dicermati oleh kita adalah pelaku keterasingan yang akut umumnya tidak melihat dunia kemasyarakatan sebagai sesuatu yang memang seharusnya demikian. Si pelaku tidak mau menerima peran-peran sosial yang ditentukan baginya, tetapi ia dengan sadar menciptakan kegiatannya sendiri dengan mana ia dapat mengidentifikasi dirinya.

Tidak semua penyimpangan merupakan suatu keterasingan atau setidaknya dirasakan sebagai keterasingan. Hal ini disebabkan penyimpangan adalah masalah-masalah penilaian masyarakat tentang apakah seorang individu dalam memainkan peranannya memenuhi harapan-harapan masyarakat. Sebagaimana telah diungkapkan bahwa si juragan bakul sebagai patron melakukan "kecurangan" kepada nelayan sebagai klien tidak akan disebut sebagai suatu penyimpangan sepanjang harapan-harapan yang diberikan padanya terkait dengan peranannya itu, yaitu mampu membeli hasil tangkapan dan memberikan "pinjaman" kepada para nelayan selama musim paceklik dapat dipenuhi olehnya. Sementara itu, sudah diuraikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh juragan bakul merupakan suatu keterasingan, semenjak kehidupannya banyak ditujukan sebatas sebagai instrumental mencapai tujuan hidupnya. Perbedaan mendasar antara keterasingan dengan penyimpangan adalah disebabkan dalam menentukan seseorang sebagai orang yang "terasing" lebih berdasarkan pada penilaian moral kita sebagai orang yang mengkaji kehidupan sosial masyarakat perikanan. Kenyataan ini sesungguhnya menimbulkan suatu konsekuensi berupa tantangan bagi kita untuk dapat diakui oleh setiap masyarakat yang kita kaji sebagai bagian dari mereka.

D. KEKUASAAN: KETIMPANGAN SOSIAL DAN OTORITAS

Kekuasaan sangat terkait dengan keteraturan sosial yang tergantung pada pemusatan kekuasaan di tangan mereka yang mendapat keuntungan daripadanya. Keteraturan sosial juga tergantung pada bagaimana orang-orang mendefinisikan situasi sosial. Terkait dengan kekuasaan, jika terdapat ketidaksesuaian definisi maka definisi yang dipakai adalah definisi dari kelompok yang berkuasa dalam masyarakat. Pendapat seorang tokoh masyarakat perikanan, umumnya lebih dianggap dibandingkan anggota masyarakat biasa.

Pemegang peranan (*role player*) yang dihadapkan oleh berbagai macam pengharapan, biasanya akan lebih cenderung untuk memenuhi harapan-harapan yang didukung oleh sanksi yang paling berat. Seorang nelayan akan cenderung untuk melakukan *illegal fishing* jikalau ia secara moral akan dikenakan sanksi sebagai kepala keluarga yang tidak mampu memberi nafkah keluarganya. Tindakan nelayan mungkin berbeda jika pengawasan terhadap kegiatan *illegal fishing* sangat ketat dan yang melakukan dikenakan sanksi yang berat. Bila demikian mungkin ia akan berpikir untuk melakukan kegiatan ekonomi lainnya untuk dapat tetap memberi nafkah bagi keluarganya. Pertanyaan yang menyentuh dalam permasalahan sosial ekonomi masyarakat perikanan selanjutnya adalah bagaimana jika alternatif pekerjaan tidak tersedia untuknya?

Di samping itu, kekuasaan juga berhubungan dengan keterasingan. Hal ini dikarenakan keterasingan individu dari kegiatannya menunjukkan kurangnya kemampuan mengendalikan kegiatannya. Seorang nelayan yang terasing sesungguhnya merupakan sasaran dari kekuatan yang berasal dari luar dirinya sendiri, baik dalam bentuk agak abstrak (seperti: standar keberhasilan mencapai kekayaan) ataupun dalam bentuk kekuatan manusia yaitu kekuatan dari patronnya (juragan atau bakul ikan). Implikasi dari uraian ini adalah salah satu dimensi penting untuk memecahkan masalah keterasingan adalah tidak adanya kekuasaan (*powerless*).

Dalam kaitannya dengan kekuasaan menunjukkan suatu hubungan sosial, pemilikan kekuasaan bukan hanya melibatkan kemampuan individu untuk menguasai kegiatannya sendiri, tetapi juga kemampuan untuk menguasai kegiatan orang lain. Kekuasaan dilihat sebagai kemampuan dari sekelompok orang terhadap kelompok orang lainnya. Namun demikian, perlu diingat

bahwa hal ini bukan merupakan suatu pembenaran atas berkuasanya sekelompok orang terhadap kelompok orang lainnya.

Berdasarkan proposisi dasar bahwa kekuasaan mencerminkan suatu hubungan sosial, maka didapat tiga proposisi alternatif mengenai sifat kekuasaan, yaitu:

1. melihat penggunaan kekuasaan serta adanya orang yang berkuasa dan dikuasai sebagai suatu ciri yang melekat dalam organisasi sosial, sama seperti kita melihat norma-norma sosial sebagai ciri inheren dalam organisasi sosial;
2. kekuasaan bersumber pada keteraturan normatif, keteraturan moral dalam kehidupan sosial dan merupakan karakteristik dari apa yang dikenal sebagai teori "konsesus";
3. kekuasaan bersumber pada kegiatan produktif dari hubungan sosial yang terlibat dalam sarana produksi.

Dari ketiga proposisi yang terkait dengan kekuasaan, didapat dua sudut pandang dalam menelaah kekuasaan. Kekuasaan dapat dipandang dari sisi *konflik* dan *konsesus*. Dari sudut pandang konflik, kekuasaan dapat dilihat sebagai suatu pertentangan antar dua pihak yang memiliki perbedaan di dalam tujuan atau kepentingan. Masing-masing pihak ingin menguasai dan selama tujuan kelompok penguasa yang diikuti dengan penetapan berbagai norma atau aturan dipatuhi atau menjadi suatu *konsesus*, sesungguhnya telah terjadi keteraturan sosial dalam masyarakat di mana kelompok-kelompok tersebut berada. Keadaan akan berbalik, yaitu ketidakseimbangan sistem sosial yang berjalan, manakala konsesus tersebut tidak lagi dipatuhi dan bahkan ada keinginan dari kelompok yang dikuasai untuk berbalik menguasai. Hal ini terjadi manakala kekuasaan yang sesungguhnya diberikan oleh masyarakat tersebut telah dimanipulasi oleh pihak yang berkuasa dan tanpa sadar telah mengusik prasyarat-prasyarat terjadinya *konsesus* yang ada.

Kekuasaan pada akhirnya menunjukkan sebagai salah satu faktor yang sangat menentukan dalam berbagai masalah penting dalam gejala sosial. Teori kekuasaan dalam hal ini dapat diaplikasikan oleh kita sebagai salah satu dasar dalam memecahkan persoalan yang terjadi yang terkait dengan isu pemberdayaan masyarakat perikanan. Kasus kekisruhan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Sumur, Banten merupakan indikasi perubahan konsesus yang menjadi suatu konflik.

Langgengnya suatu bentuk kekuasaan terkait erat dengan otoritas, yaitu kekuasaan yang sah. Kekuasaan menjadi suatu otoritas pada saat penggunaannya dianggap sah dan benar oleh mereka yang tunduk di bawahnya. Sebagai contoh pengaturan keramba jaring apung (KJA) di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat oleh Otorita Jatiluhur dipatuhi karena menggunakan aturan-aturan pengelolaannya sebagai senjata di dalam mengatur masyarakat maka institusi ini semata-mata hanya mengandalkan kekuasaan. Namun, pada saat aturan-aturan pengelolaan tersebut dipatuhi karena masyarakat menerimanya sebagai sesuatu yang harus dipatuhi, berarti Otorita Jatiluhur telah menggunakan otorita. Contoh kasus ini menunjukkan pula pentingnya pembedaan dalam masyarakat antara otoritas dan kekuasaan yang melembaga (*institutionalised power*). Kekuasaan dapat dijalankan dalam suatu kerangka yang legal-institutional, tetapi tidak berarti pelaksanaan kekuasaan itu diterima masyarakat sebagai suatu hal yang sah dan benar.

Max Weber membedakan otoritas ke dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Otoritas tradisional, yaitu penggunaan kekuasaan yang sah karena dijalankan sesuai dengan tradisi.
2. Otoritas legal-rasional, yaitu penggunaan kekuasaan yang absah karena dijalankan sesuai dengan hukum atau peraturan tertulis.
3. Otoritas kharismatik, yaitu kebalikan dari kedua bentuk sebelumnya. Bentuk ini semata-mata didasari oleh kharisma pribadi, daya tarik pribadi dan kualitas istimewa dari pribadi pemegang otoritas (individu) tersebut. Otoritas ini akan terus berlangsung selama diakui oleh pengikutnya dan akan hilang manakala tidak lagi dipercayai oleh pengikutnya.

Kehidupan nyata umumnya merupakan pencampuran antara ketiga jenis otoritas yang disebut di atas. Hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan kajian, sekalipun pada masyarakat perikanan tradisional seperti di Maluku Tengah (Tradisi Sasi), Aceh (Hukum Adat Panglima Laot), di Nusa Penida - Bali (Tradisi Awig-awig), Lombok Barat dan Lombok Timur (Kesepakatan Awig-awig), Pulau Para - Sulawesi Utara (Hak Ulayat Laut) dan Endokisi Kabupaten Jayapura (Hak Ulayat Laut).

Otoritas dapat pula ditelaah dalam hubungannya dengan berbagai pengertian tentang sifat dasar kekuasaan. Kekuasaan akan diakui sebagai otoritas, jika penggunaannya semata-mata dilihat bersumber pada keteraturan

normatif dan dianggap benar sepanjang kekuasaan itu sejalan dengan nilai-nilai konsesus. Sebaliknya, otoritas dapat dilihat sebagai hasil usaha mereka yang menggunakan kekuasaan untuk membujuk orang yang ada di bawah kekuasaannya untuk mengakui bahwa kekuasaan yang mereka pergunakan adalah benar dan adil, sebagaimana dapat kita lihat dalam pola patron-klien yang terjadi, baik di antara nelayan dan bakul ikan maupun pembudidaya dan pengumpul ikan. Hal ini umum terjadi manakala kekuasaan dilihat sebagai bagian dari hal yang mendasar dalam hubungan produksi, yang dipengaruhi pula oleh adanya hubungan sosial.

Satu lagi hal yang penting diperhatikan mengenai otoritas dalam masyarakat adalah pentingnya mengadakan pembedaan antara otoritas dan kekuasaan yang melembaga (*institutionalised power*). Kekuasaan KUD mina dalam menjalankan usaha jual-beli hasil tangkapan nelayan dapat saja dijalankan dalam suatu kerangka yang legal-institusional, tetapi tidak berarti pelaksanaan kekuasaan itu diterima oleh nelayan sebagai suatu hal yang sah dan benar. Kekuasaan yang melembaga adalah kekuasaan yang dipergunakan menurut keteraturan normatif, namun tidak selalu orang menerimanya sebagai otoritas. Hal ini terjadi bila keabsahan dari lembaga dan prosedur konstitusionalnya mendapat tentangan dari masyarakat, seperti halnya yang terjadi pada lembaga LEPP M3 di masyarakat pesisir di wilayah Pandeglang, Banten. Tujuan dari pembedaan yang dimaksud tidak lain untuk memperlihatkan bahwa kekuasaan yang melembaga (LEPP M3) dapat saja tidak berdasarkan pada mufakat dan itu dapat terjadi karena "golongan oposisi" (dalam hal ini nelayan) tidak terorganisasi secara baik.

E. KELAS-KELAS SOSIAL DAN *ELITE*

Kekuasaan dapat dikatakan juga sebagai faktor terbentuknya *elite* masyarakat. *Elite* ini merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki ideologi, disebut dengan ideologi *elite*, yang berisikan pembenaran terhadap dominasi *elite* dengan menunjuk kepada kemampuan dan keistimewaan mereka dalam bidang kegiatan tertentu.

Terkait dengan kekuasaan institusional, kekuatan ini mungkin berkembang atas dasar pembagian kelas sosial, namun setelah ia melembaga maka penggunaan kekuasaannya akan dipertahankan atas dasar pelembagaan itu sendiri. Namun menurut analisis terakhir, kelas sosial hanya ada jika dianggap ada sebagaimana keteraturan sosial, tergantung pada orang yang

mendefinisikannya. Diskriminasi terhadap orang-orang yang berasal dari kelas bawah terjadi karena mereka dianggap berasal dari kelas yang rendah. Meskipun demikian, kelas sosial tidak hanya merupakan penggolongan sosial semata-mata atau pelapisan sosial atas dasar ketidaksamaan, tetapi merupakan kelompok-kelompok sosial yang diketahui mempunyai kepentingan dan menganut nilai serta ideologi yang berbeda-beda pula. Pada setiap masyarakat, ideologi dari kelas yang berkuasa lebih kuat pengaruhnya.

Kelas sosial juga sering kali dibedakan dengan status sosial. Mengikuti pandangan Weber, kelas sosial berhubungan dengan kesempatan seseorang untuk mendapatkan imbalan ekonomi, sedangkan status sosial berhubungan dengan penilaian sosial terhadap kehormatan dan *prestise* seseorang. Berdasarkan pengertian ini, maka dalam mengkaji kelas sosial yang ada di masyarakat perikanan, sepertinya kita akan merasa cukup dengan melihat bakul atau juragan sebagai bagian dari kelas *elite* dilihat dari sisi ekonomi, sementara ulama sebagai orang yang terhormat dan berpengaruh dari sisi hubungan sosial. Namun demikian, analisis yang kita peroleh ternyata tidak akan semudah itu. Kelas sosial yang berkuasa dalam sistem produksi akan memiliki posisi yang dominan dalam menentukan penilaian terhadap penghargaan sosial dan *prestise* sosial. Kelas penguasa selain itu juga dapat mempengaruhi pendapat masyarakat mengenai pekerjaan apa yang dianggap penting. Arti dari kedua kalimat terdahulu adalah penilaian terhadap status sosial dan *prestise* sosial berkembang melalui proses-proses sosial sedemikian rupa sehingga mungkin akan terdapat jurang perbedaan antara kelas sosial dengan posisi statusnya. Perubahan penilaian terhadap status adalah lebih lambat jika dibandingkan dengan perubahan imbalan ekonomi bagi posisi tertentu. Misalnya, pendapatan seorang ulama dapat saja turun secara drastis tetapi status sosialnya tidak akan menurun drastis. Sementara itu, seorang juragan kapal yang menurun pendapatannya dan tidak mampu membayar nelayan-buruhnya akan berakibat status sosialnya menurun secara drastis di mata masyarakatnya. Oleh karena itu, kita lihat bahwa banyak juragan kapal pada saat ini mempunyai banyak hutang untuk memenuhi kebutuhan ABK atau nelayan buruh-nya, terkait dengan kemungkinan merosotnya status sosialnya jika tidak dapat dilakukannya.

F. PERSAMAAN SOSIAL DAN DEMOKRASI

Teori-teori yang berusaha menjelaskan bahwa pembagian kelas di dalam masyarakat adalah suatu sifat dasar atau suatu syarat mutlak bagi suatu organisasi sosial akan digunakan oleh mereka yang mencari pembenaran ideologis untuk mempertahankan ketimpangan sosial. Bila pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas adalah sesuatu hal yang penting dalam tatanan masyarakat, maka dapat kita katakan bahwa usaha melenyapkan atau mengubah pembagian kelas yang ada akan sia-sia belaka, bahkan secara sosial dapat merugikan.

Teori-teori yang menyatakan tidak dapat dihindarkannya dominasi *elite* dalam masyarakat dan bahwa suatu revolusi hanya akan berhasil menggantikan *elite* yang satu dengan *elite* lainnya, merupakan suatu pembenaran kekuasaan kaum *elite*. Lebih jauh lagi, bila teori-teori tersebut juga menyatakan seperti apa yang dinyatakan oleh Vilfredo Pareto, bahwa bertahannya dominasi *elite* tergantung pada manipulasi dan kekerasan, maka hal ini berarti pembenaran atas penggunaan kekuasaan yang didasarkan pada manipulasi dan kekerasan. Seluruh pernyataan dalam dua alinea ini didasari pada pengalaman bahwa umumnya masyarakat diatur oleh kaum *elite*.

Jika pembagian kekuasaan politik dalam masyarakat berkaitan erat dengan struktur kelas dan ketimpangan sosial, maka berarti tuntutan akan demokrasi yang ideal dan pembagian kekuasaan yang merata dalam masyarakat berkaitan dengan tercapainya keadilan sosial yang ideal. Peraturan formal seperti apa pun yang akan diterapkan untuk menjamin demokrasi politik seperti pemberian hak pilih dan hak perwakilan dalam lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, tak akan menghilangkan kecenderungan bahwa kekuasaan pada aspek politik, ekonomi ataupun lainnya akan terpusat dan digunakan hanya untuk kepentingan kelas-kelas dominan. Melalui pengendalian mereka terhadap sumber-sumber serta posisi kunci kekuasaan masyarakat yang dipegangnya, kelompok yang dominan secara sosial dan ekonomi akan menggunakan pengaruhnya di dalam proses pengambilan keputusan politik. Merupakan kajian yang menarik, jika kita lihat bahwa masyarakat perikanan sangat didominasi oleh masyarakat yang tergolong dalam masyarakat miskin. Golongan masyarakat ini sangat minim dalam penguasaan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Program pemberdayaan masyarakat perikanan adalah alternatif solusi masalah di

sektor yang saat ini diharapkan menjadi *prime mover* roda pembangunan negara.

Acuan dari kalimat terakhir di atas adalah bahwa seandainya kelompok-kelompok ekonomi yang lemah tersebut mendapatkan perwakilan dalam setiap pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang terkait dengan mereka, maka kekuasaan tersebut akan dapat digunakan untuk mengubah keadaan yang tidak menguntungkan itu dan menciptakan persamaan sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Kebanyakan masyarakat nelayan ataupun masyarakat pembudidaya sering kali tidak lagi percaya pada kemurahan hati *elite* (pemerintah) untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal ini didasarkan pada pengalaman bahwa *elite* cenderung melayani kepentingan mereka sendiri. Pemerintah sering kali mengartikan masalah-masalah sosial menurut definisi mereka, menurut pandangan mereka sendiri tentang dunia sosial. Akibatnya, jika dari pihak pemerintah bukan berasal dari kelas sosial tertentu, maka tentu pandangan mereka tentang dunia sosial akan merupakan pandangan dari kelas sosial di mana ia berasal. Dapatkah membayangkan seorang pimpinan pemerintahan yang berkuasa dan berwenang di sektor perikanan bukanlah berasal dari kelas sosial yang sama dengan kebanyakan kelas sosial di masyarakat perikanan? Bagaimana kiranya kebijakan-kebijakan institusi yang dipimpinnya dapat mencerminkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya untuk menuju tingkat keadilan sosial yang lebih tinggi lagi dalam wujud taraf kesejahteraan yang lebih merata?



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Uraikan sebuah contoh kasus kajian terhadap kehidupan yang hanya dianggap sebagai instrumental atau alat untuk mencapai tujuan hidup di masyarakat perikanan.
- 2) Berikan definisi sederhana dari penyimpangan dan pelaku penyimpangan.
- 3) Sebutkan bentuk-bentuk usaha penyalarsan individu sebagai anggota masyarakat dengan nilai-nilai sosial dan

- 4) Sebutkan kaidah yang ada dalam masyarakat untuk mencapai nilai-nilai tersebut.
- 5) Berikan contoh kasus bahwa tidak semua penyimpangan merupakan suatu keterasingan atau setidaknya dirasakan sebagai keterasingan.
- 6) Kecenderungan apa yang terjadi saat pemegang peranan dihadapkan oleh berbagai macam pengharapan?
- 7) Berikan contoh kasus di masyarakat perikanan dimana langgengnya kekuasaan terkait erat dengan otoritas.
- 8) Apa yang dimaksud dengan *elite* masyarakat dan ideologi *elite*?
- 9) Jelaskan perbedaan antara kelas sosial dengan status sosial.
- 10) Uraikan hubungan antara program pemberdayaan masyarakat perikanan dengan tuntutan pembagian kekuasaan yang merata dalam masyarakat.

Petunjuk Jawaban Latihan

Anda dapat menjawab soal-soal latihan tersebut dengan menguasai pokok-pokok bahasan berikut:

Sub Pokok Bahasan	Soal No.
Keterasingan dan Peranan-peranan Sosial	1
Penyimpangan dan Pelakonan Peran	2,3,4
Keterasingan dan Penyimpangan	5
Kekuasaan: Ketimpangan Sosial dan Otoritas	6,7
Kelas-kelas Sosial dan <i>Elite</i>	8,9
Persamaan Sosial dan Demokrasi	10



RANGKUMAN

Kegiatan belajar ini memfokuskan bahasan tentang Konsep Keterasingan. Inti dari konsep ini adalah *keterasingan* akan terjadi manakala sistem yang ada mendikte kegiatan-kegiatan manusia. Hubungan antarmanusia hanya dijadikan semacam proses belaka, tidak ada sentuhan terhadap nilai-nilai maupun norma-norma yang terkandung dan sesungguhnya. Hal inilah yang berakibat pada terjadinya penyimpangan atau suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Dikaitkan dengan pelakonan peran, penyimpangan dapat terjadi akibat dua hal. Hal pertama adalah penyimpangan yang dikarenakan si pelaku adalah seseorang yang gagal memenuhi harapan-harapan pada peranannya. Hal kedua adalah penyimpangan merupakan hasil dari peranan-peranan yang memang menyimpang, yang lahir dari lingkungan sosial yang menyimpang yang tidak ada atau rendahnya ikatan dari norma-norma masyarakat.

Tekanan-tekanan sosial dan harapan-harapan sosial juga seringkali cenderung mengukuhkan si pelaku penyimpangan di dalam penyimpangannya. Di samping itu, tidak semua penyimpangan merupakan suatu keterasingan atau setidaknya dirasakan sebagai keterasingan, dikarenakan penyimpangan adalah masalah-masalah penilaian masyarakat tentang apakah seorang individu dalam memainkan peranannya memenuhi harapan-harapan masyarakat.

Keterasingan juga berhubungan dengan kekuasaan, di mana keterasingan individu dari kegiatannya menunjukkan kurangnya kemampuan untuk mengendalikan kegiatannya. Dalam kaitannya dengan suatu hubungan sosial, pemilik kekuasaan bukan hanya melibatkan kemampuan individu untuk menguasai kegiatannya sendiri, tetapi juga kemampuan untuk menguasai kegiatan orang lain. Kekuasaan dilihat sebagai kemampuan dari sekelompok orang terhadap kelompok orang lainnya. Lebih lanjut, kekuasaan dapat dilihat sebagai suatu *konflik*, yaitu pertentangan antar dua atau lebih pihak yang memiliki perbedaan dalam tujuan atau kepentingan. Tatkala masing-masing pihak ingin menguasai dan selama tujuan kelompok penguasa yang diikuti dengan penetapan berbagai norma atau aturan dipatuhi, maka kekuasaan dipandang sebagai alat mencapai suatu *konsekus*, yaitu telah terjadinya keteraturan sosial dalam masyarakat yang mana kelompok-kelompok tersebut berada.

Langgengnya suatu bentuk kekuasaan terkait erat dengan otoritas atau kekuasaan yang sah manakala penggunaannya dianggap sah dan benar oleh mereka yang tunduk di bawahnya. Secara umum, otoritas yang terjadi dalam kehidupan nyata merupakan pencampuran antara otoritas tradisional (dijalankan sesuai dengan tradisi), otoritas *legal-rasional* (dijalankan sesuai dengan hukum atau peraturan tertulis) dan otoritas kharismatik (dijalankan semata-mata didasari oleh karisma pribadi, daya tarik pribadi dan kualitas istimewa dari pribadi pemegang otoritas tersebut).

Otoritas juga berbeda dengan kekuasaan yang melembaga (*institutionalised power*), yaitu kekuasaan yang dipergunakan menurut keteraturan normatif, namun tidak selalu orang menerimanya sebagai otoritas. Hal ini terjadi bila keabsahan dari lembaga dan prosedur konstitusionalnya mendapat tentangan dari masyarakat dikarenakan

kekuasaan yang melembaga dapat saja tidak berdasarkan pada mufakat dan itu dapat terjadi lebih dikarenakan "golongan oposisi" tidak terorganisasi secara baik.

Kekuasaan dapat dikatakan juga sebagai faktor terbentuknya *elite* masyarakat, yaitu sekelompok masyarakat yang memiliki ideologi *elite* yang berisikan pembenaran terhadap dominasi *elite* dengan menunjuk kepada kemampuan dan keistimewaan mereka dalam bidang kegiatan tertentu. Terkait dengan kekuasaan institusional, kekuatan ini mungkin berkembang atas dasar pembagian kelas sosial, namun setelah ia melembaga maka penggunaan kekuasaannya akan dipertahankan atas dasar pelembagaan itu sendiri. Namun, kelas sosial hanya ada jika dianggap ada sebagaimana keteraturan sosial tergantung pada orang yang mendefinisikannya.

Kelas sosial juga dapat dikatakan berbeda dengan status sosial. Kelas sosial lebih ditinjau dari aspek ekonomi manakala berhubungan dengan kesempatan seseorang untuk mendapatkan imbalan ekonomi, sedangkan status sosial berhubungan dengan penilaian sosial terhadap kehormatan dan prestise seseorang. Perubahan yang terjadi pada seseorang dalam kelas sosial karenanya lebih cepat dibandingkan dengan status sosial. Terkait dengan aspek politik, pembagian kekuasaan dalam masyarakat berkaitan erat dengan struktur kelas dan ketimpangan sosial. Hal ini memiliki arti bahwa tuntutan akan demokrasi yang ideal dan pembagian kekuasaan yang merata dalam masyarakat berkaitan dengan tercapainya keadilan sosial yang ideal.



TES FORMATIF 4

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Suatu sistem tata kelakuan atau norma-norma yang dianut oleh seorang individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan definisi dari lembaga
 - A. Sosial
 - B. Ekonomi
 - C. Budaya
 - D. Politik

- 2) Sistem ekonomi berdasarkan mekanismenya dapat dibagi menjadi tiga jenis, *kecuali*
- Mekanisme pasar
 - Mekanisme intervensi negara
 - Mekanisme sosial budaya
 - Mekanisme kekuasaan
- 3) Menurut pandangan ekonomi klasik, mekanisme pasar yang terbaik adalah Mekanisme
- Pasar
 - Intervensi negara
 - Sosial budaya
 - Kekuasaan
- 4) Pengaturan negara dalam mekanisme pasar, dari sudut pandang pasar disebut sebagai suatu
- regulasi
 - intervensi
 - distorsi
 - koreksi
- 5) Pasar merupakan sub sistem ekonomi dan merupakan bagian sistem sosial, merupakan upaya memahami pasar berdasarkan pendekatan
- Jaringan sosial
 - Sistem sosial
 - Konflik
 - Permainan
- 6) Pendekatan untuk memahami pasar dengan menggunakan model "bagaimana – jika" (dalil-dalil logika dan matematika) adalah pendekatan
- Sistem sosial
 - Jaringan sosial
 - Permainan
 - Konflik
- 7) Pasar sebagai sub sistem ekonomi memiliki fungsi-fungsi yang tercakup dalam AGIL, yang merupakan singkatan dari
- Adaptation, Generate, Integrity and Latent*
 - Adopted, Goal, Integrity and Latent*
 - Adaptation, Goal, Intervention and Latent*
 - Adaptation, Goal, Integrity and Latent*

- 8) Pengumpulan informasi mengenai persaingan dalam produksi, distribusi dan konsumsi merupakan upaya memahami pasar dengan menggunakan pendekatan
- A. Konflik
 - B. Sistem sosial
 - C. Jaringan sosial
 - D. Permainan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 4.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 4, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C
- 2) C
- 3) A
- 4) A
- 5) C
- 6) D
- 7) B
- 8) A
- 9) D
- 10) A

Tes Formatif 2

- 1) A
- 2) C
- 3) C
- 4) A
- 5) B
- 6) D

Tes Formatif 3

- 1) B
- 2) A
- 3) D
- 4) B
- 5) B
- 6) C
- 7) D
- 8) A
- 9) B

Tes Formatif 4

- 1) C
- 2) C
- 3) A
- 4) D
- 5) B
- 6) A
- 7) D
- 8) C

Daftar Pustaka

- Berry, D. (2003). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Press.
- Cernea, M.M., (1988). Sosiologi Untuk Proyek-Proyek Pembangunan. dalam M.M. Cernea (Ed). *Mengutamakan Manusia Dalam Pembangunan; Variabel-Variabel Kita di dalam Pembangunan Pedesaan*. Publikasi Bank Dunia (Terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kusnadi. (2002). *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber daya Perikanan*. Yogyakarta: Penerbit LkiS.
- Masinambouw, E.K.M (Ed.). (1997). *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nikujuluw, V. P.H (1994). Sasi Sebagai Suatu Pengelolaan Sumberdaya Berdasarkan Komunitas. (PSBK) di Pulau Saparua, Maluku. *Jurnal Penelitian Perikanan Laut* 93 : 79-92. Jakarta: Balai Penelitian Perikanan Laut, Badan Litbang Pertanian
- Ritzer, G. (2003). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Satria, A. (2001). *Dinamika Modernisasi Perikanan: Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Soekanto, S. (2003). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto, A. (1984). *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Binacipta.
- Wahyono, A., Antariksa, I.G.P. Imron, M. Indrawasih, R. & Sudiyono. (2001). *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Jakarta: Penerbit Media Pressindo bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation. Cetakan Pertama.

Wisadirana, D. (2004). *Sosiologi Pedesaan: Kajian Kultural dan Struktural Masyarakat Pedesaan*. Malang: UMM Press.